



News Letter

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian

Edisi 03/NL/03/2016

Maret 2016



Produksi Padi Meningkatkan
Jadi Indikator Keberhasilan
Swasembada Pangan

Kembangkan Integrasi Hutan dan Sapi
Kementan Gandeng Perhutani



Kembangkan Integrasi Hutan dan Sapi
Kementan Gandeng Perhutani

03

Atasi Masalah Harga Gabah
Kementan Bentuk Tim Khusus

14

Pengarah
Kepala Biro Humas dan Informasi Publik
Sekretariat Jenderal Kementerian
Pertanian

Produksi Padi Meningkat Jadi
Indikator Keberhasilan Swasembada
Pangan

05

Kementan Jadikan Sukabumi Sebagai
Awal Pelaksanaan Program SERGAB

16

Penanggung Jawab
Ir. Marihot H. Panggabean, M.Si

Pentingnya Penetapan Teknologi Dalam
Mempercepat Proses Pertanian

06

Kementan Lakukan MoU Untuk
Kendalikan Harga Gabah

18

Penyunting
Agus Sumantri, S.Sos

Kawal Pasca Panen
Kementan Gelar Rakor Bersama Bulog

07

Kembangkan Jagung di Bone Bolango
Kementan Alokasikan Anggaran

19

Pelaksana
Dra. Ria Satiti Irawati
Imam Santoso, SE

Walau Banjir Melanda Produksi Padi
Justru Meningkat

09

Untuk Serap Gabah di Sulsel
Kementan Kerahkan Penyuluh

21

Anggota
Alice Raga Dewi, S.Sos
Ir. Rusman
Fajar Rahman, M.S.Ikom

Pentingnya Antisipasi Impor Produk
Pertanian Ilegal

10

Atasi Gejolak Harga Unggas
Kementan Lakukan Pertemuan
Dengan Para Peternak

22

Agar Swasembada Pangan Tidak Gagal
Pemda Harus Atasi Masalah Petani

11

Untuk Capai Swasembada Pangan
Kementan Butuh Kerja Pejabat di Atas
Rata-Rata

24

Distribusi
Makmur

Untuk Capai Swasembada Pangan
Kementan Akan Terus Bantu Petani

13

Buktikan Stok Beras Nasional Aman
Kementan Lakukan Panen Raya Serentak

25

Narasumber
Pejabat Kehumasan unit Eselon I
Lingkup Kementerian Pertanian



Kembangkan Integrasi Hutan dan Sapi Kementan Gandeng Perhutani

"Kementan mempunyai ide pengembangan peternakan sapi melalui pemanfaatan hutan mengingat sudah ada sapi ternak yang dikembangkan di perkebunan sawit. Kementan berkoordinasi dengan Perhutani untuk memberikan perhatian, kerja sama agar bisa memberi manfaat bagi masyarakat"



Mentan Andi Amran Sulaiman saat berkunjung ke Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Perah dan Hijauan Pakan di Baturaden, Jawa Tengah.



dikembangkan di kawasan hutan. Karena, sapi bisa memakan tanaman yang tumbuh di sana.

"Tahap awal, PT Perhutani sanggup menyediakan 10 ribu hektar hutan untuk pengembangbiakan sapi di Baturaden. Bisa saja hal seperti itu dilakukan di wilayah lain. Kita lihat saja perkembangannya nanti. Kementerian Pertanian berencana mengintensifkan kerjasama dengan Perum Perhutani dalam hal penyediaan lahan untuk membangun kawasan peternakan sapi perah" kata Mentan.

Mentan menerangkan program kerja sama itu diharapkan dapat segera terealisasi di Baturaden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Di beberapa titik di Baturaden, Kementan melalui Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) telah mengembangkan kawasan Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPPTU-HPT) khusus untuk ternak sapi dan kambing perah.

"Ketika sapi dikembangkan di hutan milik PT Perhutani, sapi yang akan didatangkan oleh Kementerian Pertanian bisa makan tanaman yang ada di hutan. Untuk saat ini, sudah ada kesepakatan awal secara lisan jika PT Perhutani akan menyiapkan 10 ribu hektare hutan untuk pengembangbiakan sapi di Baturaden. Bisa saja hal seperti itu dilakukan di wilayah lain. Kita lihat saja perkembangannya nanti," terang Mentan.

Terkait BPPTU-HPT Baturaden yang telah berdiri sejak 1953 lalu, Mentan mengaku agak kecewa dengan kondisi BPPTU-HPT yang selama 70 tahun berdiri, namun tak banyak mengalami kemajuan yang berarti. Mentan menyayangkan balai pengembangbiakan ternak baik sapi indukan maupun sapi perah yang tidak kunjung menunjukkan

Dalam rangka mendukung Pemerintah Indonesia untuk memenuhi kebutuhan susu murni dan daging secara nasional, Kementerian Pertanian berencana akan menekankan pentingnya integrasi sistem peternakan, khususnya peternakan sapi melalui pemanfaatan hutan yang dibutuhkan dalam mengembangkan ternak sapi perah. Kementan ajak PT Perhutani untuk bersama-sama mengembangkan hutan sapi.

"Kerja sama ini mampu mengembangbiakan hewan tersebut yang pada akhirnya bisa memberi manfaat masyarakat. Pola kerja sama ini akan kita lakukan. Tadi saya sudah hubungi direksi Perhutani dan secara lisan menyanggupi kerja sama" kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat meninjau Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Perah dan Hijauan Pakan di Baturaden, Jawa Tengah, (1/3).

Mentan mengaku tujuan berkoordinasi dengan Perhutani untuk mencari lahan peternakan. Setidaknya, dibutuhkan 10 ribu hektare lahan untuk meningkatkan produktivitas daging sapi dan susu. Keterbatasan lahan membuat sapi sulit

untuk produktivitas. Nantinya satu hektare hanya boleh diisi sekitar lima sampai enam sapi saja.

"Untuk satu ekor sapi, diperlukan 50 kilogram rumput. Peternak harus menfermentasi dan mencampur pakan dengan jerami untuk memenuhi kebutuhan itu. Ini yang harus dipikirkan, bagaimana hutan berintegrasi dengan sapi. Ini penting agar sapi-sapi meningkat dan biaya pakan dapat ditekan," ujar Mentan.

Mentan mencontohkan, jika integrasi lahan hutan-sapi berhasil, sapi bisa diprogramkan untuk melahirkan satu kali dalam setahun. Dalam 12 tahun sapi akan 12 kali melahirkan

"Ini ibarat kita membeli pabrik sapi. Sekarang IB 3 juta ekor. Satu indukan sama dengan 3 sapi lokal bali. Artinya kalau butuh 1 juta ekor, sapi luar 500 ribu ekor cukup," jelas Mentan.

Mentan mengatakan ide pengembangan peternakan sapi melalui pemanfaatan hutan muncul ketika sudah ada sapi ternak yang dikembangkan di perkebunan sawit, sehingga sapi bisa makan bongkahan pohon sawit yang selesai dipanen. Sapi cocok



perkembangan dan hasil yang signifikan.

“Saya sedih dengan keberadaan balai tersebut karena tidak mampu mengembangkan sapi lokal dengan baik, sejak berdiri 70 tahun yang lalu sampai kini, Balai tersebut tidak mampu memberikan andil bagi sektor peternakan karena berbagai kendala, seperti sarana dan prasarana yang sudah tua dan tidak ada modernisasi, hingga lahan yang tidak mencukupi” kata Mentan.

Mentan meminta jajaran BPPTU-HPT Baturaden dan Bupati Banyumas untuk dapat segera mengajukan permohonan kerjasama dengan Perum Perhutani. Saat ini, lokasi balai tersebut pun bersebelahan dengan kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani.

“Kami inginnya membuat integrasi sapi-hutan, bentuknya seperti integrasi sapi-sawit. Jadi nanti kita impor indukannya untuk dikembangkan di sini. Kita usahakan ada kerjasama lahan dengan Perhutani,” ujar Mentan.

Mengingat di lokasi tersebut, hanya ada sekitar total 150 ekor sapi perah. Mentan akan mengajukan rencana kerjasama lahan dengan Perum Perhutani untuk mengembangkan peternakan sapi-hutan terintegrasi (silvopastura). Dengan mengembangkan peternakan silvopastura, diharapkan dapat menekan biaya pakan ternak sapi secara signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), biaya pakan merupakan komposisi terbesar pengeluaran peternak, mencapai

44% dari total yang mereka keluarkan. Selain itu, jika balai dapat memperoleh lahan, maka pemerintah akan memberikan kuota impor sapi indukan yang tahun ini ipatok sebanyak 50.000 ekor.

“Kementerian Pertanian menargetkan BPPTU-HPT dapat segera mengimpor 500-1.000 ekor tahun ini dengan lahan yang dikerjasamakan sekitar 3.000-4.000 ekor. Target kami, berapapun yang diimpor akan dapat kita salurkan ke petani, tapi balai harus bisa mengendalikan seluruhnya. Kami akan segera menghitung dengan baik, dari lahan yang dikerjasamakan, bisa berapa ekor impornya, saya akan mengembangkan BPPTU - HPT secara perlahan hingga kelak dapat menopang kebutuhan susu nasional. Setelah ini Kementan akan segera mengajukan surat kerjasama untuk Perhutani,” ujar Mentan.

Menanggapi keinginan kerjasama dari pihak Kementan, Kepala BPPTU-HPT Baturaden, Sugiono menyampaikan, saat sekarang balai telah memiliki total 500 ekor kambing dan 1.500 ekor sapi perah dengan total produksi per hari mencapai 3.000 liter susu. Apalagi Balai besar pembibitan ternak unggul yang sekarang berfokus di pengembangan sapi perah.

Sementara itu, Direktur Pengelolaan Sumber Daya Hutan Perum Perhutani, Heru Siswanto menyampaikan untuk dapat menentukan apakah lahan yang

dibutuhkan dapat tersedia, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Hutan Perum Perhutani menanti pengajuan proposal kerjasama program dari Kementerian Pertanian.

“Jadi kita bisa sama-sama mengetahui apa yang diinginkan, bagaimana skemanya, bagaimana penentuan waktu kerjasamanya, dan apa yang harus dipersiapkan. Nanti proposalnya akan dikaji oleh Tim Pengkajian Pengembangan Usaha Perhutani,” kata Direktur Pengelolaan Sumber Daya Hutan Perum Perhutani.

Direktur Pengelolaan Sumber Daya Hutan Perum Perhutani menerangkan saat sekarang Perum Perhutani mengelola 2,44 juta kawasan hutan yang tersebar di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Adapun, sepanjang 2016, Perhutani telah mengalokasikan lahan untuk pengembangan peternakan sapi dengan sistem pengembalaan di kawasan hutan dengan model pengembangan ranch atau silvopastura.

“Untuk peternakan, kami masih mengembangkan skala trial. Kami rencanakan 5.000 hektare. Seluas 2.000 hektare di antaranya sudah disinergikan dengan Pemprov DKI Jakarta yaitu kawasan hutan di Jabodetabek yang dikelola Perhutani,” terang Direktur Pengelolaan Sumber Daya Hutan Perum Perhutani.



Produksi Padi Meningkatkan Jadi Indikator Keberhasilan Swasembada Pangan



"Pemerintah serius merealisasikan swasembada pangan nasional khususnya beras. Salah satunya dengan mengalokasikan anggaran untuk bantuan peralatan dan menggiring petani menuju sistem pertanian modern. Hasilnya juga dinilai sudah cukup menggembirakan. Produktifitas padi nasional meningkat pesat"



Mentan Andi Amran Sulaiman memberi sambutan sebelum melakukan panen perdana padi di Bulak Sideman, Wates Kulonprogo.

Program swasembada pangan yang dicita-citakan dan ditargetkan oleh pemerintah Indonesia mulai menampakkan hasil. Salah satu indikator dari keberhasilan swasembada pangan adalah peningkatan produksi tanaman padi. Memasuki musim panen pertama 2016, produksi gabah meningkat enam persen.

"Angka ini luar biasa tinggi. Tertinggi selama sepuluh tahun terakhir. Apalagi ini setelah terjadi El Nino, saya menerima kabar gembira, produksi padi tahun ini naik pesat. Bahkan meningkat pesat dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir," kata Menteri Pertanian, Amran Sulaiman saat mengikuti panen perdana padi di Bulak Sideman, Wates Kulonprogo (2/3).

Mentan menyebutkan angka sementara kenaikan produksi beras saat sekarang di Indonesia pada angka 6 persen. Kenaikan produksi beras nasional tahun 2016 tidak bisa disangkal lagi. Karena dibuktikan dengan data dan fakta empirik. Pada umumnya, tren yang terjadi setiap tahun, harga beras akan naik Januari-Februari hingga 30 persen. Dijelaskan oleh Mentan, saat ini harga justru turun hingga 23 persen.

Selama 10 tahun tidak pernah terjadi hal seperti ini. Produksi petani melimpah

saat paceklik. Dan ini fakta tidak bisa dibantah. Fakta empiris, beras melimpah di pasar juga di daerah, padahal ini belum panen puncak baru pemanasan" ucap Mentan.

Mentan menerangkan selain melimpah di pasaran, saat paceklik di Januari-Februari harga beras juga bisa turun 20-30 persen. Harga gabah bisa terkendali karena pemerintah bisa mengendalikan impor beras. Dengan melimpahnya beras saat sekarang maka tidak ada impor beras, impor yang dilakukan hanya berupa cadangan untuk menghadapi El-Nino.

"El Nino pada tahun 2015 memiliki intensitas 2,4% lebih tinggi saat El Nino pada tahun 1997 sebesar 1,9%. Dengan jumlah penduduk yang makin bertambah, jika dilakukan interpolasi menurutnya impor yang dilakukan harusnya besar, namun pemerintah berhasil menekannya dan produksi padi kali juga justru melimpah" terang Mentan.

Mentan mengaku pernah mengecek capaian produksi padi di berapa kabupaten di Jawa Tengah. Seperti Demak, Sragen, dan Purworejo. Hasilnya, tidak ada kelangkaan. Padahal, pada Januari-Februari biasanya kerap disebut musim paceklik. Paceklik berdampak harga gabah maupun beras mahal. "Hal itu tak terjadi saat ini. Dari hasil pantauan saya, harga gabah di pasaran

berkisar Rp 2.500-Rp2.800 per kilogram. Momen puncak panen Maret-April. Target produksi beras 4 juta hingga 5 juta ton, jika target tercapai, maka dipastikan tidak akan ada kebijakan impor beras. Impor (produk pertanian) sekarang turun 74 persen" kata Mentan.

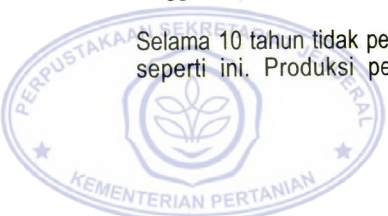
Lebih lanjut Mentan menjelaskan selain beras, peningkatan produksi tanaman pangan lainnya. Terutama jagung dan bawang. Bahkan, ekspor jagung melonjak hingga seribu persen, sedangkan bawang naik 100 persen.

"Di luar komoditas padi, ekspor komoditas lainnya seperti bawang merah dan jagung juga memiliki kenaikan angka yang cukup baik. Sehingga impor beras tak perlu lagi dirisaukan" jelas Mentan.

Dalam acara panen tersebut Mentan juga membagikan sejumlah bantuan alat mesin pertanian bagi kelompok tani desa setempat. Dengan begitu petani harus segera mengolah lahan agar produksi tetap meningkat. Selesai panen petani harus langsung olah dan langsung tanam, setelah diberikan alat pertanian.

Menurut Mentan, pemerintah serius merealisasikan swasembada pangan nasional khususnya beras. Salah satunya dengan mengalokasikan anggaran untuk bantuan peralatan dan menggiring petani menuju sistem pertanian modern. Hasilnya juga dinilai sudah cukup menggembirakan. Produktifitas padi nasional meningkat pesat.

"Meningkatnya produksi tanaman pangan tidak lepas dari tekad pemerintah untuk selalu menggulirkan sejumlah program khusus pertanian. Diantaranya, penggunaan mekanisasi alat-alat pertanian, perbaikan dan peningkatan saluran irigasi, pemberian benih unggul, hingga terjaminnya distribusi pupuk" ucap Mentan.



Mentan menjelaskan bantuan alat diberikan dengan maksud kelompok tani bisa menurunkan sewanya. Sehingga petani bisa menikmati. Sebab, dengan pemberian alat, biaya produksi bisa turun 40 persen. Kalau biaya operasional turun maka petani kuat, generasi muda mau turun ke sawah. Dan petani siap menuju pertanian modern.

"Kabar baik juga berpihak bagi petani di Kulonprogo, tahun 2014 bantuan yang semula hanya Rp 13 miliar, sementara tahun 2015 bantuan naik menjadi

Rp. 99 M. Sehingga naiknya 600 persen, semoga tahun 2016 minimal sama. Doa petani di Kabupaten Kulonprogo nampaknya dikabulkan oleh Allah," jelas Mentan.

Pada acara yang sama, Bupati Bantul Suharsono berjanji akan turut menyukseskan program swasembada pangan. Salah satunya dengan meminimalisasi alih fungsi lahan hijau. Pemkab tidak akan mengizinkan pembangunan kompleks perumahan di lahan hijau maupun area pertanian subur.

"Saya berharap pemerintah pusat aktif menyalurkan berbagai bantuan sarana pertanian. Mudah-mudahan Bantul menjadi percontohan baik. Jangan sampai orang mau makan ndadak impor," tutur Bupati Bantul

Wakil Bupati Kulonprogo Sutedjo juga menyampaikan, di Kulonprogo swasembada pangan telah diupayakan sedemikian rupa. Bahkan untuk melindungi petani, diupayakan hasil panen melalui gapoktan.

Pentingnya Penerapan Teknologi Dalam Mempercepat Proses Pertanian



Mentan Andi Amran Sulaiman di dampingi Bupati Sleman saat akan memberikan bantuan Alat Mesin Pertanian sebelum melakukan panen raya di Candisingo, Prambanan.

"Pemerintah Daerah dan warga masyarakat petani harus bergerak cepat dalam proses panen. Pemerintah Daerah dapat menambah pemberian alat dan mesin pertanian kepada para petani yang nantinya dapat digunakan untuk mendukung proses pertanian. Apalagi sumber daya manusia di bidang pertanian terbatas. Untuk mengatasi Kementan adalah meningkatkan penerapan teknologi pertanian dalam proses pertanian di Indonesia"

Sektor pertanian masih menjadi sektor unggulan di Kabupaten Sleman. Hal itu dapat dilihat dari masih tingginya warga masyarakat yang menggantungkan mata pencahariannya dari sektor tersebut. Seperti yang dilakukan warga Candi Singo, Madurejo, Prambanan dengan melaksanakan panen raya yang dihadiri langsung oleh Menteri Pertanian beserta Bupati Sleman.

Pada acara panen, Mentan menghimbau pada pemerintah daerah Sleman dan warga masyarakat petani Candi Singo yang hadir agar bergerak cepat dalam proses panen. Mentan juga menginstruksikan pemerintah daerah Sleman untuk menambah pemberian alat dan mesin pertanian kepada para petani yang nantinya dapat digunakan untuk

mendukung proses pertanian di wilayah Madurejo, Prambanan.

"Proses panen harus dilakukan dengan cepat, untuk selanjutnya melakukan penanaman kembali sehingga diharapkan produksi pertanian dapat lebih meningkat, Kami akan tambah satu mesin combine harvester, lima hand tractor, serta satu transplanter untuk mempermudah para petani dalam menggarap lahannya, sehingga diharapkan nantinya hasil pertanian dapat semakin optimal" kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat panen raya di Dusun Candisingo, Prambanan (2/3).

Mentan mengungkapkan, sumber daya manusia di bidang pertanian terbatas. Hampir tidak ada regenerasi petani tua ke yang lebih muda. Padahal, data BPS menunjukkan, produktivitas pangan terutama padi dalam waktu 10 tahun terakhir terus meningkat sebesar enam

persen. Kementan kini terus melakukan upaya agar produksi padi tak berkurang walaupun sumber daya manusianya terbatas.

"Dari data yang saya ketahui, jumlah petani terus menurun. Sekarang yang ada kebanyakan berusia di atas 50, Salah satu upaya yang dilakukan Kementan adalah meningkatkan penerapan teknologi pertanian dalam proses pertanian di Indonesia. Misalnya kami bagikan traktor dan alat mesin panen ke petani-petani. Harapannya, para petani bisa meningkat efektivitas dan produktivitasnya," ungkap Mentan.

Lebih lanjut Mentan meminta kepala daerah khususnya di Pulau Jawa untuk menekan alih fungsi lahan pertanian mengingat Kepala daerah memiliki peran penting untuk mengeluarkan kebijakan yang melindungi pertanian dari serangan pembangunan

perumahan. Karena itu, kepala daerah khususnya di Pulau Jawa harus bisa menekan alih fungsi lahan pertanian.

"Kepala daerah memiliki peran penting untuk mengeluarkan kebijakan yang melindungi pertanian dari gempuran pembangunan perumahan. Dari pusat kami selalu mensupport agar alih fungsi lahan diminimalisir. Saya minta kepala daerah gubernur dan bupati untuk tetap mempertahankan lahan pertanian," pinta Mentan.

Mentan menegaskan Kementan selalu berkoordinasi dengan kepala daerah terkait peningkatan produktivitas pertanian, bahkan di Kabupaten Sleman. Kementan menargetkan penambahan lahan seluas 100 hektare di Kabupaten Sleman. Target tersebut merupakan jawaban dari permintaan Bupati Sleman yang ingin memanfaatkan lahan mangkrak seluas 50 hektar di Kecamatan Cangkringan akibat bencana erupsi Gunung Merapi. Kementan akan penuh cetak sawah 50 hektare, kalau Pemkab bisa menyediakan lahan 100 hektare akan lebih baik.

"Pemerintah selama 2016 akan mencetak 200 ribu hektare sawah baru di seluruh daerah dalam upaya meningkatkan produksi padi serta mencapai swasembada pangan. Pencetakan sawah baru tersebut untuk mengganti sejumlah sawah yang kena alih fungsi, untuk mencetak sawah

tersebut pemerintah mengajak prajurit TNI Angkatan Darat bersama petani untuk menciptakan sawah yang selanjutnya siap untuk ditanam padi. Pencetakan sawah baru itu, sudah merupakan keputusan pemerintah dalam upaya menciptakan swasembada pangan yang pada akhirnya untuk ketahanan pangan nasional" tegas Mentan.

Mentan mengatakan, produksi padi nasional sebenarnya sudah baik bahkan meningkat tapi langkah pencetakan sawah baru tetap harus dilakukan. Tentu pencetakan sawah baru itu dilakukan secara bertahap di seluruh daerah Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi padi di Indonesia berdasarkan Angka Sementara (ASEM) Tahun 2015 naik sebesar 6,37 persen dari tahun 2014 yang sebesar 70,85 juta ton gabah kering giling (GKG) menjadi 75,36 juta ton GKG. Untuk padi ada luas panen meningkat mulai Januari-Agustus 2015, sedangkan September--Desember itu hampir negatif. Sementara untuk produktivitas juga mengalami peningkatan sebesar 3,97 persen dari sebelumnya 51,35 kuintal per hektare menjadi 53,39 kuintal per hektare.

Pada periode Januari-April 2015 tercatat produksi padi sebesar 33,06 juta ton atau mengalami kenaikan sebesar 4,73 persen jika dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang sebesar

31,57 juta ton. Periode selanjutnya atau Mei-Agustus 2015, jumlah produksi meningkat sebesar 13,26 persen atau menjadi 25,78 juta ton dari sebelumnya sebesar 22,76 juta ton. Sedangkan September-Desember tercatat meningkat 0,01 persen dari sebelumnya 16,525 juta ton menjadi 16,527 juta ton.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Sleman Sri Purnomo mengatakan meski mengalami penyusutan lahan pertanian, namun produksi pertanian di Sleman mengalami peningkatan. Tercatat di 2014 hasil produksi sebesar 314.298 ton gabah kering giling dengan luas panen 52.232 hektare dan produktivitas 60,17 kwintal/hektare. Sedangkan pada 2015, dengan luas panen 50.356 hektare berhasil memproduksi 328.683 ton gabah kering giling dengan luas dengan produktivitas 66,91 kwintal/hektare.

"Meski luas panen menurun, namun produksi padi yang dihasilkan justru mengalami peningkatan karena produktivitas yang meningkat, untuk sasaran luas panen di 2016 tercatat pada Januari hingga Maret sebesar 26.181 hektare, pada April hingga September 2016 sebesar 24.65 hektare.

"Sehingga sasaran luas tanam total pada Oktober hingga September sebesar 50.831 hektare. Kami optimistis produksi padi pada 2016 dapat kembali mengalami surplus," kata Bupati Sleman.



Mentan Andi Amran Sulaiman usai menyaksikan kesepakatan antara Perum Bolog dan seluruh bupati/walikota se-Jawa Timur di eks Kresidenan Madiun.

Kawal Pasca Panen Kementan Gelar Rakor Bersama Bulog

"Kementan menggelar Rapat Koordinasi bersama sebelas pemerintah daerah kota/kabupaten se-Jawa Timur bersama Bulog di Makorem 081/Dhirotsaha Jaya, Madiun, Jawa Timur karena ada permintaan langsung dari Presiden untuk mengawal pascapanen padi di lapangan dan langsung membeli gabah para petani"

Kondisi ketika panen raya merupakan kondisi yang biasanya sangat tidak menguntungkan bagi petani, dikarenakan ketika musim tersebut datang, harga gabah jatuh. Untuk itu Kementerian Pertanian melakukan Nota Kesepakatan Bersama dengan Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) agar dapat membeli gabah dan beras petani yang saat

harganya dibawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) secara berkelanjutan dan perkembangan data keterserapan ini dilaporkan setiap minggu. Kesepakatan menyerap gabah dan beras dari petani berlaku untuk seluruh Wilayah di Indonesia.

"Seluruh gabah milik petani di wilayah eks Keresidenan Madiun akan dibeli Perum Badan Urusan Logistik (Bulog). Hal itu

sebagai solusi atas permasalahan harga gabah milik petani yang jatuh lebih rendah dibandingkan harga pokok pembelian (HPP) yang ditetapkan pemerintah pada panen raya musim tanam pertama 2016" kata Menteri Pertanian, Amran Sulaiman saat menyaksikan kesepakatan antara Perum Bulog dan seluruh bupati/wali kota



yang ada di wilayah eks Keresidenan Madiun pada acara Rapat Koordinasi dalam Rangka Pengamanan Harga Gabah yang Anjlok Saat Panen Raya di Sentra Produksi di Aula Korem 081/Dhirotsaha Jaya Madiun, (3/3).

Mentan menuturkan ada permintaan langsung dari Presiden untuk mengawal pascapanen padi di lapangan dan langsung membeli gabah para petani. Untuk itu, Kementan langsung menggelar Rapat Koordinasi bersama sebelas pemerintah daerah kota/kabupaten se-Jawa Timur bersama Bulog di Makorem 081/Dhirotsaha Jaya, Madiun, Jawa Timur.

"Untuk itu, hari ini saya kumpulkan para pemimpin daerah, baik bupati atau wali kota untuk langsung membuat kesepakatan dengan Bulog terkait pembelian gabah hasil panen dari para petani. Dan pembayarannya secara cash," tutur Mentan.

Dalam rapat koordinasi dan menyaksikan secara langsung penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara 9 Bupati dan 2 Walikota yang ada di wilayah Bakorwil Madiun, dengan Perum Bulog yang ditandatangani oleh Direktur Pengadaan Bulog, Mentan didampingi Dirjen Sarana dan Prasarana Pertanian, Aster Kasad, Kasdam V Brawijaya, dan Komandan Korem 081/Dhirotsaha Jaya.

Mentan mengatakan Nota Kesepakatan Bersama tersebut merupakan sejarah baru di Indonesia bahwa Bulog akan menyerap dan membeli seluruh gabah milik petani. Ini dilakukan karena permasalahan harga gabah dari petani yang saat ini jatuh di bawah HPP.

"Bulog tidak hanya membeli beras, tetapi juga akan membeli gabah dari petani. Dua pekan terakhir, banyak petani yang mengeluh soal harga gabah yang jauh

dari harga yang ditetapkan pemerintah. Semoga kebijakan ini menjadi solusi bagi permasalahan itu," kata Mentan.

Lebih lanjut Mentan menerangkan selama beberapa hari keliling daerah mulai dari Jawa Barat, Tengah hingga Timur, ternyata pembelian gabah ditingkat petani masih dibawah HPP (Harga Pembelian Pemerintah) gabah. Meski begitu, Bulog tidak kunjung melakukan action untuk membeli gabah kepada petani. Untuk itu Mentan meminta kepada Badan Usaha logistik (Bulog) agar membeli langsung gabah petani.

"Saya heran, Bulog tidak kunjung melakukan action melakukan pembelian gabah langsung kepada petani. Padahal harga gabah di petani antara Rp 3.200-Rp 3.500 per kg. Begitu mendapat laporan dari para kepala daerah se Korem ini, harga masih dibawah HPP. Atas kondisi itu, hari ini saya minta Bulog membuat perjanjian dengan para kepala daerah, agar selalu siap membeli gabah petani," terang Mentan.

Mentan menjelaskan sesuai Inpres, harga pembelian Gabah Kering Panen (GKP) dengan kadar maksimum air 25% dan hampa maksimum 10%, Rp 3.700 per kg di petani atau Rp 3.750 per kg di penggilingan. Lalu, Gabah Kering Giling (GKG) kualitas kadar air minimum 14% dan kotoran 3%, Rp 4.600 per kg di penggilingan atau Rp 4.650 per kg di gudang Bulog.

"Untuk pembelian beras kualitas kadar air maksimum 14%, butir patah maksimum 20%, kadar menir 2% dan derajat sosoh minimum 95% Rp 7.300 per kg di gudang Bulog. Saya mengintruksikan kepada Perum Bolog untuk membeli gabah hasil produksi gabah petani secara tunai (cash). Hal itu sesuai dengan permintaan Presiden Joko Widodo" jelas Mentan.

Untuk melakukan pengawasan Mentan meminta bantuan dari Komandan Resor Militer 081/Dhirotsaha Jaya, Kolonel (inf) Hardani Lukitanta melalui Dandim, Koramil hingga Babinsa di masing-masing wilayah agar melakukan kontrol kepada petani dan Bulog.

"Saya menginginkan agar semua transaksi berjalan dengan baik dan benar. Bolog akan membeli sesuai harga pembelian pemerintah (HPP) Rp 3.700. Saat ini banjir panen padi, saya tidak mau gabah petani dibeli murah oleh tengkulak dan dijual dengan sangat mahal," ujar Mentan.

Mentan meminta kepada Bulog agar segera menyelesaikan pembayaran pembelian gabah ke petani secara tunai, dan dibantu pengendaliannya oleh kepala daerah serta jajaran TNI.

Menanggapi permintaan Mentan, Direktur Pengadaan Perum Bulog, Wahyu, menyampaikan Bulog akan berkomitmen untuk membeli gabah dari petani. Batas pembayaran gabah bagi petani yaitu 1 X 24 jam sudah bisa dibayarkan, sehingga petani bisa mendapatkan uang untuk melanjutkan produksi. Sekarang HPP gabah yang ditetapkan pemerintah Rp. 3.700/kg. Bulog akan menggunakan harga tersebut sebagai dasar pembelian gabah.

"Bulog juga akan melihat kualitas gabah dari petani, seperti melihat kotoran gabah itu dan kadar airnya. Kalau untuk harga gabah senilai Rp3.700/kg itu gabah dengan kadar air 25%. Ketika gabah dari petani memiliki kadar air lebih dari itu, kata Wahyu, tentu harganya akan berbeda. Tetapi, pihaknya tetap menggunakan aturan dari pemerintah. Akan kami cek dulu kualitas gabahnya, kalau sesuai akan kami bayar dan beras tersebut akan kami keringkan," ujar Direktur Pengadaan Bulog.



Walau Banjir Melanda Produksi Padi Justru Meningkatkan



Mentan Andi Amran Sulaiman di dampingi bupati Nganjuk Taufiqurahman sedang memotong tumpeng usai panen raya tanda ucapan syukur dengan naiknya jumlah panen tahun ini di Kabupaten Nganjuk.

Keunggulan sektor pertanian kabupaten Nganjuk diakui oleh Kementerian Pertanian. Meski bencana banjir terjadi di beberapa daerah dan menggenangi lahan pertanian, tetapi daerah Nganjuk justru dapat melaksanakan panen raya padi sehingga kondisi beras nasional di awal tahun 2016 lebih dari cukup.

"Dibanding tahun lalu, produksi awal tahun biasanya mengalami paceklik. Namun tahun ini telah naik bahkan mencapai 30 persen. Surplus beras tersebut nantinya akan dimanfaatkan untuk ekspor ke luar negeri" kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat panen raya di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk (03/03)

Usai melakukan panen raya padi di lahan siap dipanen seluas 200 hektare, Mentan menyebutkan di awal tahun 2016 produksi gabah petani mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibanding pada awal tahun 2015. Padahal awal tahun biasanya petani mengalami musim paceklik yang menyebabkan produksi gabah turun, apalagi banjir sempat melanda di beberapa kawasan produksi padi di Indonesia.

"Banjir yang melanda di beberapa kawasan produksi padi di Indonesia, ternyata tidak begitu berpengaruh pada hasil produksi pertanian. Karena, selain air yang menggenangi lahan cepat surut, juga adanya tanam serempak yang dilakukan petani dengan ditunjang irigasi yang lebih baik. Produksi pertanian awal tahun ini hingga bulan Maret diperkirakan mengalami peningkatan 30 persen," ujar Mentan.

Mentan mengakui stok padi yang melimpah di tingkat petani menjadi salah satu pemicu turunnya harga gabah.

Saat sekarang harga gabah kering dijual dengan harga Rp 3.200 perkilogram. Padahal harga pembelian pemerintah melalui Bulog Rp 3.700 perkilogram. Turunnya harga tersebut juga disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya banyaknya tengkulak yang menjadi perantara.

"Saya perintahkan Bulog untuk menyerap langsung gabah di tingkat petani, agar harga menjadi stabil dan tidak merugikan petani. Produksi melimpah di awal tahun merupakan langkah yang baik yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk swasembada pangan. Dengan produksi yang melimpah, pemerintah bisa melakukan ekspor beras ke luar negeri," imbuh Mentan.

Mentan menjelaskan produksi gabah pada musim panen sekarang rata-rata sebanyak 8 ton dalam satu hektare sawah. Diperkirakan, puncak panen raya akan terjadi pada bulan Maret hingga April dengan target pencapaian produksi mencapai 14,52 juta ton.

"Sedangkan untuk musim tanam kali ini harapan pemerintah harga padi jangan sampai dibawah batas minimum yaitu Rp 3.100,- per kilo. Saya minta pihak Bulog harus mampu menyelamatkan harga panen petani," jelas Mentan.

Sebagai salah satu upaya memantau stok pangan demi mewujudkan swasembada pangan, Mentan menerangkan tahun 2016 Kabupaten Nganjuk akan mendapatkan bantuan alat mesin pertanian dari Kementerian Pertanian RI.

"Untuk jenis bantuan alsintan tidak akan jauh berbeda dengan bantuan pada 2015. Di antaranya pompa diesel, alat pemanan (combine harvester), alat tanam (rice transplanter), alat mesin konseler untuk pemipil jagung dan alat perontok jagung/kedelai" terang Mentan.

"Awal tahun 2016 produksi gabah petani mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibanding pada awal tahun 2015. Padahal awal tahun biasanya petani mengalami musim paceklik yang menyebabkan produksi gabah turun, apalagi banjir sempat melanda di beberapa kawasan produksi padi di Indonesia. Ternyata banjir tersebut tidak begitu berpengaruh pada hasil produksi pertanian"

Dalam dialog dengan kelompok tani, Mentan mengetahui empat permintaan para petani diantaranya pemerintah diharapkan bisa menyelamatkan harga padi petani yang saat ini mengalami penurunan, terjual Rp 3.500 perkilo. Agar pemerintah bersedia memberikan pinjaman yang akan dikelola pada saat menjelang musim paceklik, serta bantuan sarana irigasi untuk lebih ditingkatkan meskipun dari pemerintah daerah sudah dibantu program Jitot dan Jides namun belum maksimal. Pada paska panen ini diharapkan bantuan alat mesin pertanian bisa segera turun mengingat untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan program swasembada pangan.

Menanggapi permintaan para kelompok tani, Mentan dengan tegas siap mengakomodir. Dengan catatan bantuan pemerintah harus dimanfaatkan untuk kepentingan petani dan jangan sampai dijual.

"Kepada dinas terkait untuk menjalankan peran pengawasannya terhadap bantuan yang akan diturunkan kepada petani" tegas Mentan.

Dalam acara yang sama Bupati Nganjuk, Taufiqurahman menerangkan dalam panen raya sekarang pemerintah selalu berperan aktif melalui dinas terkait agar para petani bisa merasakan hasil panen rayanya. Terutama harga jual gabah yang harus stabil.

"Langkah ini diambil semata-mata agar para petani di Kabupaten Nganjuk semakin jaya. Dengan naiknya jumlah panen tahun ini, harus diimbangi dengan stabilnya harga gabah. Jangan sampai para petani merugi," terang Bupati Nganjuk.



Sedangkan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, Agus Subagio mengatakan panen raya sekarang adalah sesuai dengan program percepatan tanam. Oleh karenanya seluas lahan 200 hektar siap panen di Desa Mancon panennya mendahului dibandingkan dengan area pertanian

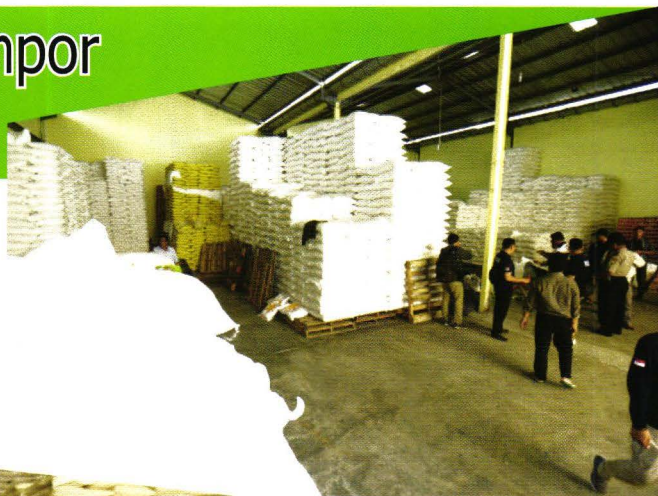
lainnya. Hasil panen pertama musim penghujan sekarang rata-rata bisa menghasilkan 8,5 sampai 11 ton per hektar.

“Dari hasil itu tergolong masih aman dan petani diprediksi tidak merugi, dengan pemberian bantuan itu sangat membantu

petani. “Dengan penggunaan bantuan Alsintan harapannya selain bisa mengurangi biaya produksi juga relatif lebih cepat. Petani pun dengan cepat bisa langsung menjemur hasil panen,” kata Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk.

Pentingnya Antisipasi Impor Produk Pertanian Ilegal

“Kementan bertekad melakukan pengawasan lebih ketat terhadap kasus-kasus impor produk pertanian ilegal. Pentingnya langkah dalam mengantisipasi dengan menahan impor produk ilegal. Caranya ialah dengan memperketat pengecekan dan mengontrol setiap saat. Regulasi pemerintah sudah jelas. Kalau dokumen tidak lengkap pasti ditahan dan dimusnahkan”



Surabaya, Pelabuhan Tanjung Perak. Buah impor ilegal sebanyak ratusan ton itu ditahan karena tidak melampirkan surat jaminan kesehatan dari negara asal. “Untuk mengelabui petugas, importir menyusun bagian luar ribuan boks dalam kontainer itu berupa buah pir. Sebagian bahkan berada dalam kondisi yang rusak alias busuk. Di luarnya pir, tetapi di dalamnya ada jeruk. Ini sangat berbahaya jika beredar di Indonesia, karena diduga

Berpedoman pada Permentan No 42/2012, Balai Karantina Buah Kementerian Pertanian melakukan penyitaan sebanyak 606 kilogram jeruk, pir, dan apel tanpa jaminan kesehatan asal Tiongkok. Beragam buah yang dicurigai dapat menimbulkan penyakit baik bagi kesehatan manusia atau menimbulkan wabah penyakit tumbuhan berada dalam 34 kontener di Terminal Peti Kemas Surabaya langsung dibongkar, dan dimusnahkan.

“Penyitaan ratusan buah asal Tiongkok tersebut dilakukan karena buah tersebut mengandung bibit penyakit. Dari cara penanaman, hingga pengemasannya tidak memiliki standarisasi tanaman buah. Kami tidak mau meracuni masyarakat akan keberadaan buah ini,” kata Menteri Pertanian, Amran Sulaiman usai menyaksikan dan membuka kontainer sitaan Balai Besar Karantina Pertanian



Mentan Amran Sulaiman beserta jajaran Polda. Kasdam, Anggota Komisi IV DPRRI, Kepala Balai Karantina Pertanian dan Kepala Terminal Petikemas sedang menyaksikan hasil sitaan buah impor ilegal di terminal peti kemas Surabaya.

Surabaya, di Terminal Petikemas Surabaya (TPS), (4/3).

Mentan memaparkan Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya menyita kontainer berisi buah impor jeruk, pir, dan apel asal Cina di Terminal Peti Kemas

mengandung penyakit lalat buah,” kata Mentan.

Dalam acara yang dihadiri Kapolda Jawa Timur, Kasdam, Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya, dan Kepala Terminal Petikemas Surabaya

serta 29 Anggota Komisi IV DPR RI, Mentan menyebutkan jumlah yang disita sebanyak 34 kontainer atau setara dengan 609.986 kilogram buah jeruk, pir, dan apel tanpa jaminan kesehatan asal Negeri Tiongkok yang disita Februari lalu. Penahanan dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan dokumen dan fisik yang tidak sesuai dimana pada dokumen keterangan yang disebutkan merupakan buah pear, tetapi di dalamnya terdapat jeruk dan apel.

"Buah-buah ilegal tersebut tidak disertai surat jaminan kesehatan. Buah-buah impor juga tanpa syarat kesehatan. Apalagi, kelengkapan buah impor harus mengacu pada Permentan No 42 tahun 2012 tentang impor pangan yang menimbulkan penyakit baik bagi kesehatan manusia atau menimbulkan wabah penyakit tumbuhan. Jika buah-buah impor ini masuk tanpa syarat kesehatan bisa terindikasi membawa telur atau larva penyebab penyakit. Hal tersebut pernah terjadi di Jepang pada 2012, dimana buah jeruk asal Tiongkok membawa organisme pengganggu tumbuhan dan menyebabkan gagal panen hingga mencapai 50 persen," jelas Mentan.

Menurut Mentan kuat dugaan kesehatan buah buahan yang diimpor tersebut masih dipertanyakan pemerintah Indonesia karena buah-buahan tersebut diduga mengandung telur lalat. Buah-buah ilegal tersebut juga tidak disertai surat jaminan

kesehatan. Hal itu terbongkar setelah petugas melakukan pengecekan surat-surat.

"Jika buah-buah impor ini masuk tanpa syarat kesehatan bisa terindikasi membawa telur, atau larva penyebab penyakit. Ini pernah terjadi di Jepang pada 2012, dimana buah jeruk asal Tiongkok membawa organisme pengganggu tumbuhan dan menyebabkan gagal panen hingga mencapai 50 persen," ujar Mentan.

Mentan menegaskan pentingnya langkah antisipasi dengan menahan buah ilegal tersebut. Sebab, berdasarkan PerMentan tahun 2012, spesies lalat buah dari Negeri Tiongkok itu ialah *Bactrocera tsuneonis* atau Japanese Orange Fly alias Cutrus Fruit Fly yang merupakan organisme pengganggu tumbuhan yang tidak terdapat di Indonesia, sehingga perlu kewaspadaan tingkat tinggi.

"Jepang pernah terkena wabah lalat buah spesies tersebut, sehingga mengakibatkan 50 persen produk buahnya gagal panen. Potensi kerugian yang dialami kalau ini lolos Rp 2,2 triliun, jadi diantisipasi karena bisa menimbulkan kerugian bila masuk ke Indonesia," tegas Mentan.

Lebih lanjut Mentan menjelaskan bahwa Kementan bertekad melakukan pengawasan lebih ketat terhadap kasus-kasus impor produk pertanian

ilegal semacam itu. Caranya ialah dengan memperketat pengecekan dan mengontrol setiap saat.

"Regulasi pemerintah sudah jelas. Kalau dokumen tidak lengkap pasti ditahan dan dimusnahkan. Sekarang yang penting pengetatan pengawasan di wilayah karantina di pelabuhan, supaya ini jangan bebas masuk" jelas Mentan.

Mentan menerangkan pihak Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya bekerja sama dengan Kepolisian Daerah Jawa Timur untuk menyidik pelaku importirnya. Ada penegak hukum yang nanti menentukan hukumannya seperti apa, sedangkan untuk melakukan penyitaan dalam jumlah besar, Kementan telah berkoordinasi dengan TNI, dan Kepolisian Jawa Timur. Hal itu dilaksanakan untuk mengantisipasi adanya pengiriman buah ilegal lain melalui beberapa jalur. Seperti jalur darat, laut, hingga udara.

"Biar nanti polisi, dan tentara yang memeriksa setiap pengiriman buah dari luar negeri. Ini juga harus diperhatikan oleh masyarakat dan yang terpenting patut diketahui bahwa stok buah Indonesia sebenarnya masih mampu untuk memenuhi kebutuhan buah masyarakat Indonesia. Apalagi kualitas buah lokal di tanah air tidak kalah bersaing dengan buah yang berasal dari impor. Untuk itu masyarakat harus lebih mencintai buah lokal ketimbang mengkonsumsi buah impor," kata Mentan.



Mentan Andi Amran Sulaiman di dampingi Bupati Tuban saat panen raya jagung di Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban.

Agar Swasembada Pangan Tidak Gagal Pemda Harus Atasi Masalah Petani

"PemKab Tuban harus serius menyelesaikan masalah para petani. Karena lahan produktif menjadi tidak maksimal karena selalu menjadi korban banjir. Jawa Timur merupakan penyokong swasembada pangan tertinggi setelah Provinsi Gorontalo, Sulawesi. Jika permasalahan klasik seperti banjir dapat segera terselesaikan maka sudah dapat dipastikan akan meningkat pula hasil pertanian Kabupaten Tuban"

Dalam rangka mewujudkan swasembada pangan, petani harus dilindungi dan mendapat perhatian ekstra dari Pemerintah. Untuk itu Kementerian Pertanian memantau kinerja Pemkab Tuban dalam mengatasi banjir, karena petani disepanjang Avoru Kuvu selalu menjadi langganan banjir tiap musim hujan. Lahan pertanian di kawasan avour kuvu memanjang 18 KM melintasi Kecamatan



Rengel, Kecamatan Plumpang dan Kecamatan Widang selalu tergenang saat musim hujan.

“Saat ini produksi pertanian nasional pada tahun 2015 telah meningkat jika dibandingkan dalam waktu kurun waktu selama 10 Tahun terakhir. Jangan sampai hasil pertanian dan swasembada pangan kedepan kita yang telah berada di ujung kaki kita gagal karena lahan persawahan terkena banjir” kata Menteri Pertanian, Amran Sulaiman saat meninjau kawasan persawahan di kawasan Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, (5/3).

Kepada Pemerintah Kabupaten Tuban, Mentan menghimbau mereka harus serius menyelesaikan masalah para petani. Karena lahan produktif menjadi tidak maksimal karena selalu menjadi korban banjir.

“Jawa Timur merupakan penyokong swasembada pangan tertinggi setelah Provinsi Gorontalo, Sulawesi. Jika permasalahan klasik seperti banjir dapat segera terselesaikan maka sudah dapat dipastikan akan meningkat pula hasil pertanian Kabupaten Tuban” kata Mentan.

Menindaklanjuti intruksi Presiden RI, Mentan bakal menelusuri setiap daerah dari Sabang sampai Merauke. Tindakan tersebut untuk menekan problem petani, sekaligus memberikan solusi langsung maupun berkala. Saat sekarang Pemerintah telah menekan impor sekecil mungkin. Upaya tersebut tidak mudah, berbagai pihak harus bersinergi baik petani, masyarakat, maupun elemen lainnya.

“Kementan siap menekan impor jagung masuk Indonesia selama hasil produksi Nasional meningkat. Komitmen tersebut bertujuan memacu etos kerja

petani lokal, tetap menjaga kualitas hasil panennya setiap tahun. Kalau produksi jagung melimpah impor akan dihentikan. Semua pihak harus menyadari pentingnya keseimbangan harga,” kata Mentan.

Mentan meminta seluruh petani merubah prinsip hukum ekonomi di Indonesia. Dimana ketika panen raya datang, harga jual hasil pertanian harus normal. Hal tersebut dapat diantisipasi dengan cara mengontrol tempo penjualan. Kualitas hasil pertanian harus dijaga betul.

“Harga jagung di Tuban hanya Rp 2.300 per kilogramnya. Besaran tersebut harus dinaikkan agar petani tidak merugi. Harga jagung normal kisaran Rp 2.700 sampai Rp 3 ribu per kilogramnya (Kg). Dengan harga jagung Rp 2.700 per Kg, petani sudah untung,” tandas Mentan.

Lebih lanjut Mentan, menyatakan bahwa jagung sendiri menjadi komoditas unggulan Kabupaten Tuban di bidang pertanian, karena jagung Bumi Wali merupakan pemasok Nomor 1 terbanyak se Jawa Timur. Oleh sebab itu, harga jagung menjadi prioritas Pemkab Tuban, agar penjualannya bisa stabil pasca panen.

“Pemerintah akan terus memonitor perkembangan harga jagung, agar tidak turun lagi dan dapat merugikan para petani jagung. Kalau harga jagung di sini terendah Rp. 2.300 per kilogram. Jangan sampai turun lagi, Kalau harga segitu masih turun, silakan lapor ke Kementan dan datang langsung ke Jakarta, biar nanti Kementan yang membiayai,” tukas Mentan.

Mentan sangat mengapresiasi dedikasi, dan etos kerja petani Tuban. Penyebabnya tanpa memperoleh bantuan bibit dari pemerintah, mampu

memproduksi jagung secara maksimal. Tetapi soal kenaikan harga jagung.

“Saya bersyukur, raport produksi jagung tahun 2015 mampu menunjukkan tertinggi selama 10 tahun terakhir. Karena, hal itu berkat kerja keras selama ini demi mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia,” tutur Mentan.

Mentan mengingatkan petani jagung bahwa masih banyak pihak serupa peternak unggas mengeluh ketika melejitnya harga jagung. Apalagi beberapa waktu lalu harga jagung mencapai Rp 6 ribu per Kg. Kenaikan harga jagung serentak mendapat respon keras dari peternak di berbagai daerah.

Bupati Tuban Fatchul Huda, yang turut hadir dalam acara tersebut, mengatakan jagung di Kabupaten Tuban sangat luar biasa. Namun, agar petani semangat untuk bertani, hendaknya ada yang harus diperhatikan, yaitu tata niaga dengan harapan bisa dikelola dengan baik dan harga jagung tidak sampai anjlok lagi. Diharapkan para petani bisa berproduksi jagung dan menjualnya dengan harga yang mahal dan maksimal, karena luasan tanam setiap tahun bertambah.

“Saya berharap kunjungan Mentan awal tahun ini memberikan dampak positif bagi pertanian Tuban. Pemda sangat bangga dengan semangat petani di wilayahnya, dimana produksi jagung Tuban nomor 1 se-Jatim. Lainnya produksi padi urutan ke-8, dan daging urutan kedua tingkat regional, produksi jagung Tuban, tahun ini ada peningkatan 10 ribu ton. Tahun sebelumnya jumlah produksi jagung hanya 80 ribu ton, dan tahun ini meningkat 90 ribu ton jagung. Kondisi ini harus dipertahankan demi menjaga swasembada pangan lokal,” ujar Bupati Tuban.





Untuk Capai Swasembada Pangan Kementan Akan Terus Bantu Petani

“Dengan pemberian bantuan di harapkan para petani akan selalu bersemangat untuk menanam padi. Petani tidak perlu takut untuk menanam padi ketika musim kemarau maupun musim hujan karena Kementan akan terus berupaya memberikan bantuan agar tercapai swasembada pangan”

Melalui Kementerian Pertanian, Pemerintah Indonesia, kembali mempertegas sikapnya dalam mengejar target program swasembada pangan nasional, untuk itu pihak Kementan akan menambah bantuan lima mesin transpalater sebagai bentuk apresiasi petani Bojonegoro yang terus berusaha meningkatkan produksinya untuk mewujudkan swasembada pangan.

“Bantuan tersebut hanya suatu simbol, kedepannya di harapkan para petani akan selalu bersemangat untuk menanam padi. Kepada petani untuk tidak takut menanam padi ketika musim kemarau maupun musim hujan karena kami dari Kementan akan terus berupaya membantu” kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman melakukan panen raya di Desa Tambahrejo, Kecamatan Kanor, Bojonegoro (5/3).

Didampingi Bupati Bojonegoro bersama Muspida Bojonegoro dan kelompok tani setempat, Mentan menyaksikan langsung panen padi di daerah lahan seluas 120 hektare yang terkena dampak banjir sebagai upaya

peningkatan swasembada pangan Nasional.

Dalam kesempatan itu Mentan menyerahkan bantuan 124 unit handtraktor dan 56 unit transpalater yang bersumber dari APBN 2016. Bantuan tersebut di serahkan kepada beberapa perwakilan kelompok tani (poktan) di Kecamatan Kanor dan Baureno.

Bahkan, Mentan menegaskan bersedia memberikan bantuan pompa ketika musim kemarau. Termasuk petani juga akan dimudahkan dalam penjualan hasil panen karena bulog akan membeli semua hasil panen mereka.

“Saya minta kepada Bulog untuk menyerap semua hasil panen petani Bojonegoro, dan menaikkan harganya. Jangan sampai sebutir gabah pun keluar dari Bojonegoro. Bulog harus menyerapnya,” tegas Mentan.

Usai melakukan panen, Mentan melakukan dialog dengan masyarakat sekitar, khususnya para petani. Jika kebutuhan pokok petani harus selalu tercukupi. Misalnya, masalah pupuk, bibit dan penjualan gabah.

“Pupuk bersubsidi bagi petani harus disalurkan secara tepat waktu. Karena proses pemupukan merupakan hal paling penting dalam pertanian. Jangan sampai pupuk bersubsidi dapat dipermainkan” kata Mentan.

Selain penyerahan bantuan handtraktor, Mentan menyerahkan pembayaran secara simbolis klaim asuransi usaha tani kepada petani yang mengalami kerusakan tanaman padi akibat banjir dan kepada penerima Klaim Asuransi yang telah terdaftar sebelumnya. Terdapat tiga kelompok tani yang lahannya terkena bencana banjir menerima Klaim Asuransi yaitu Poktan Suka Maju sebesar Rp. 4.200.000, Poktan Subur mendapatkan Rp.2.880.000, dan Poktan Sae mendapat Rp. 1.800.000.

“Petani tidak perlu takut untuk menanam lahan ladangnya, selain bantuan handtraktor juga dapat Klaim Asuransi jika terdampak bencana, para petani Bojonegoro diharapkan terus dan tidak takut menanam padi. Meskipun tahun ini merupakan tahun basah. Petani

diharapkan terus menanam, jangan khawatir masalah banjir dan kekeringan. Sebab, nantinya akan ditanggung dengan asuransi pertanian dari PT Jasindo," tandas Mentan.

Terkait permintaan Bupati Bojonegoro untuk keterlibatan Kabupaten Tuban dalam pembangunan pintu air yang disebutnya dengan Bendung Gerak Mini, Mentan berjanji akan mengkoordinasikan, dengan terlebih dahulu pengajuan dari pihak kabupaten ke Kementerian Pekerjaan Umum yang ditembuskan padanya. Lokasi yang disebut paling urgen adalah di Desa Lebaksari, Kecamatan Baureno.

Saat mendampingi Mentan, Bupati Bojonegoro, Suyoto mengatakan, akibat banjir luapan Sungai Bengawan Solo

telah menggenangi 1.700 hektar areal lahan persawahan. Dari jumlah tersebut 600 hektar yang rusak parah.

"Untuk daerah Tambahrejo, kecamatan Kanor lah yang masih dapat selamat. Hingga Maret ini luas lahan padi yang dipanen mencapai 21 ribu hektar, dan pada April nanti seluas 35 ribu hektar. Sedangkan Mei nanti kita prediksi produksi tertinggi," kata Bupati Bojonegoro.

Untuk mendukung peningkatan produktivitas dan penanganan banjir, Bupati Bojonegoro bersedia menyiapkan APBD minimal 100 milyar untuk pembangunan tanggul di sungai Semarmendem yang berbatasan langsung dengan kabupaten Lamongan dan kabupaten Bojonegoro.

"Hanya dibutuhkan dana sebesar Rp 25 Miliar guna menjamin perputaran uang hasil pertanian sebesar Rp 200 Miliar lebih di kawasan Kecamatan Baureno. Untuk mengamankan lahan seluas 3.252 hektare," ujar Bupati Bojonegoro.

Menurut Bupati Bojonegoro, lahan tersebut merupakan kawasan langganan banjir yang terdiri dari 1.782 hektare lahan di Kecamatan Baureno dan sisanya di kecamatan sekitarnya. Sebagian besar selalu terancam gagal panen akibat dampak dari luapan sungai Bengawan Solo ataupun Sungai Ingas. Kalau di bangun pintu air akan meningkatkan index pertanian, dari 1 kali tanam menjadi 3 kali tanam dan tentunya meningkatkan pendapatan masyarakat.

Atasi Masalah Harga Gabah Kementan Bentuk Tim Khusus

"Atas arahan Presiden, Kementerian Pertanian menggandeng Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan, Perum Bulog, KPPU, TNI-AD dan BRI untuk membentuk Tim khusus yang akan berupaya untuk menyerap kelebihan pasokan gabah yang saat sekarang sudah mulai membludak. Guna mengatasi permasalahan itu, Pemerintah harus mengintervensi untuk menyerap gabah petani dengan harga yang bersaing"

Mentan Andi Amran Sulaiman di dampingi Sekretaris Jenderal Hari Priyono saat melakukan Rapat Sinergi Sergap Serap Gabah dan Beras di Gedung D Kampus Kementan.



Dalam menjaga kestabilan harga gabah di tingkat petani yang mengalami penurunan usai musim panen Pemerintah melalui Kementerian Pertanian akan segera membentuk tim khusus. pembentukan tim khusus ini

didasari atas temuan harga gabah di tingkat petani yang berada di bawah rata-rata Harga Pokok Pembelian, sesuai yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebelumnya. Ditargetkan dalam tiga bulan ke depan, tim khusus tersebut

mampu menyerap setidaknya empat juta ton pasokan gabah.

"Kami baru saja dari 18 Kabupaten, dan kami lihat langsung di lapangan. Dalam dua minggu terakhir, harga gabah jatuh di Rp. 3.000, Atas arahan Presiden, kami ambil keputusan untuk membentuk tim. Tim khusus ini, nantinya akan berupaya untuk menyerap kelebihan pasokan gabah yang saat ini sudah mulai membludak. Insya Allah, sampai Mei kami targetkan bisa menyerap 3 juta

ton - 4 juta ton gabah” kata Menteri Pertanian, Amran Sulaiman saat melakukan Rapat Sinergi Sergap Serap Gabah dan Beras yang dilaksanakan di Aula Gedung D, Kantor Pusat Kementan, (10/03)

Menurut Mentan dari bulan Maret-Mei 2016 akan ada panen dari 6 juta hektare sehingga bakal ada tambahan pasokan dari panen petani sebanyak 17 juta ton beras. 1 hektare lahan pertanian bisa menghasilkan sekitar 5,3 ton gabah atau setara 2,96 ton beras. Dengan luas area panen mencapai 6 juta hektare, maka panen selama 3 bulan itu bisa diasumsikan mencapai 17,8 juta ton beras. Untuk itu perlu ada manajemen yang baik agar melimpahnya pasokan ini tidak sampai merugikan petani.

“Panen pada bulan Maret, April, Mei kurang lebih 6 juta hektare dikali 5,6 ton gabah. Artinya ada 3 juta ton gabah atau tersedia di lapangan beras 17 juta ton. Ini momen Pemerintah serap gabah sebesar-besarnya. Kalau tidak kita manfaatkan, Oktober harga bisa mahal dibanding harga puncak, Momentum tersebut, akan dimanfaatkan untuk melakukan penyerapan beras sebesar-besarnya lewat Perum Bulog untuk mengantisipasi lonjakan harga di bulan-bulan berikutnya” ujar Mentan.

Terkait 17 juta ton beras yang akan dipanen selama kurun waktu 3 bulan, Mentan menghimbau Perum Bulog untuk mempercepat penyerapan gabah dan beras selama panen raya berlangsung. Peran Bulog sangat dibutuhkan untuk mempercepat penyerapan. Bulog ditargetkan dapat menyerap sebesar 3 juta ton hingga 4 juta ton setara beras selama panen raya

berlangsung.

“17 juta ton itu merupakan tambahan pasokan panen dari para petani. Untuk itu, Bulog harus segera bergerak cepat melakukan penyerapan sehingga harga gabah dan beras petani tidak turun karena melimpahnya pasokan di lapangan. Kami perkirakan ada sekitar 6 juta hektare (ha) sawah yang akan panen selama tiga bulan ke depan,” ujar Mentan.

Mentan memaparkan sesuai arahan Presiden pada tanggal 7 Maret 2016 untuk mengantisipasi melimpahnya produksi Panen Raya Padi di bulan Maret sampai Mei 2016 diluasan tanam 6 juta ha, dengan hasil rata-rata 5 ton per ha yang akan menghasilkan produksi padi 30 juta ton maka Kementerian Pertanian menggandeng Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan, Perum Bulog, KPPU, TNI-AD dan BRI guna mengatasi permasalahan itu, Pemerintah harus mengintervensi untuk menyerap gabah petani dengan harga yang bersaing.

“Untuk memuluskan upaya tersebut, Kementerian Pertanian perlu membuat tim khusus untuk menyelamatkan harga gabah Tim khusus ini akan dinahkodai oleh Kementan dengan anggota dari Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik, Komisi Pengawas Persaingan Usaha hingga TNI juga dilibatkan. Nanti Kepala Dinas Provinsi akan ikut membantu, Semua pihak terkait harus mendahulukan sinergi dan menghilangkan egoisme sektoral, bersama-sama memperhatikan gabah yang saat ini jatuh dibawah dari Harga Pokok Pemerintah” papar Mentan.

Mentan menerangkan pentingnya pembentukan tim penyerapan gabah

2016, karena dari hasil roadshow keliling Pulau Jawa telah terjadi anjloknya harga gabah di tingkat petani. Tingginya pasokan gabah menyusul panen yang terjadi selama bulan ini hingga April telah menekan harga di tingkat petani. Harga gabah ditingkat petani usai panen melorot tajam, lantaran banyaknya pasokan.

“2 minggu terakhir harga gabah jatuh Rp 3.000 per kg. Baru saja dari daerah dalam 10 hari 18 Kabupaten dan melihat langsung di lapangan dan kami temukan rata-rata di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP), Data Kementerian Pertanian, harga gabah ditingkat petani sekitar Rp. 3.000/Kg, padahal harga gabah minimal yang disarankan pemerintah berkisar Rp 3.600/ Kg “ terang Mentan.

Mentan menegaskan tim penyerapan gabah tahun 2016 akan bisa menyelamatkan harga gabah di tingkat petani, terutama saat panen-panen raya di sejumlah daerah produksi pangan mulai terjadi, dengan begitu hasil kerja petani bisa dirasakan manfaatnya. Untuk sistematis penyerapan gabah dan beras dilapangan maka masing masing pihak terkait memiliki tugas sesuai tanggungjawab yang dibebani.

“Pihak Kementan bertugas memperhatikan produksi, dan memback-up Petugas Penyuluh Lapangan yang dikawal oleh Babinsa dari TNI-AD mendampingi petani, Bulog yang menjadi juru bayar, dan BRI yang membawa brankas, dan rekan-rekan wartawan yang membantu menyampaikan informasi berita yang baik untuk petani se Indonesia, Peran KPPU penting sebagai pengawas dilapangan, mana kala ada penyimpangan” tegas Mentan.



Kementan Jadikan Sukabumi Sebagai Awal Pelaksanaan Program SERGAB

“Program Serap Gabah merupakan instruksi Presiden untuk mencegah anjloknya harga gabah di tingkat petani yang pastinya sangat merugikan. Program Serap Gabah diharapkan bisa menyerap sekitar 4-5 juta ton GKG dari petani di seluruh Indonesia. Program Serap Gabah akan terus dijalankan di seluruh Indonesia yang awalnya dilaksanakan di Jabar sebagai salah satu daerah lumbung beras nasional khususnya Kabupaten Sukabumi”



Mentan Andi Amran Sulaiman di dampingi Bupati Kabupaten Sukabumi saat melakukan panen raya di desa Babakan, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi.



5,4 ton/Ha. Namun sangat disayangkan, masih terdapat tekanan terhadap petani dengan rendahnya harga yang diterima khususnya pada saat panen akibat panjangnya rantai petani dengan broker.

Kondisi harga gabah rendah diberbagai daerah yang sangat merugikan petani di awal musim panen ini segera diantisipasi Kementerian Pertanian dengan menerjunkan 1.600 orang Tenaga Harian Lepas (THL) penyuluh di Propinsi Jawa Barat, petani/gapoktan untuk membantu menyerap gabah petani. Bekerjasama dengan Bulog, program ini diharapkan dapat menjamin petani menerima harga yang pantas. Tidak hanya THL, untuk memastikan seluruh gabah hasil terserap, Kementerian Pertanian juga menggandeng TNI Angkatan Darat sebagai pendamping agar tata niaga gabah petani dapat diserap oleh Bulog sehingga kejahatan harga ditingkat petani dapat dihindari. Menyerap gabah langsung kepada petani adalah memotong mata rantai dagang beras sehingga harga pangan pokok ini di masyarakat stabil. Adanya jaminan harga beli dipetani mendorong keghairahan menanam dan bertani yang pada akhirnya akan menjamin ketersediaan dan kedaulatan pangan nasional.

Untuk menstabilkan harga gabah khususnya di tingkat petani sesuai dengan harga pembelian pemerintah (HPP), Kementerian Pertanian meluncurkan program Sergab atau Serap Gabah. Program Sergab akan menyerap gabah langsung kepada petani dengan memotong mata rantai dagang beras sehingga harga pangan pokok ini bisa stabil di masyarakat. Dalam menjalankan program tersebut pihak Kementan juga melibatkan Badan Urusan Logistik (Bulog) dengan tujuan untuk menyerap gabah, baik gabah kering panen, gabah kering giling maupun beras. Dengan demikian rantai distribusi bisa dipangkas yang tujuan akhirnya adalah menguntungkan para petani.

“Program ini merupakan instruksi dari Presiden untuk mencegah anjloknya harga gabah di tingkat petani yang pastinya sangat merugikan. Dua minggu terakhir ini kami telah berkeliling di 20 kabupaten di Jawa Barat, Timur dan Tengah. Kami melihat harga gabah

ditingkat petani masih di bawah HPP pemerintah. Saya laporkan temuan ini ke bapak Presiden. Setelah itu presiden memberi intruksi agar dibentuk tim khusus serap padi sebanyak-banyaknya untuk menstabilkan harga,” kata Menteri Pertanian, Amran Sulaiman melakukan pencaanangan secara nasional program Serap Gabah yang dilakukan di desa Babakan, kecamatan Cisaat, kabupaten Sukabumi, (12/03).

Pencaanangan secara nasional program Serap Gabah dilakukan bersamaan dengan panen perdana di areal 10 Ha dari luasan lahan padi 1.200 Ha di kecamatan Cisaat, Sukabumi. Sukabumi dijadikan tempat pencaanangan program tersebut mengingat daerah itu merupakan satu dari daerah sentra padi yang harga gabah kering panen (GKP) sebesar Rp. 3.700/Kg dibawah harga yang ditetapkan pemerintah. Menurut perkiraan panen raya di kabupaten Sukabumi dengan areal tanam 90.000 Ha dari luas baku lahan 64.000 Ha akan dilaksanakan pada akhir Maret sampai dengan April 2016. Jawa Barat sendiri memiliki angka produktivitas 6,6 ton/Ha di tahun 2016, di atas target produktivitas nasional sebesar

Mentan menargetkan dari program Serap Gabah diharapkan bisa menyerap sekitar 4-5 juta ton GKG dari petani di seluruh Indonesia. Program Serap Gabah akan terus dijalankan di seluruh Indonesia yang awalnya dilaksanakan di Jabar sebagai salah satu daerah lumbung beras nasional khususnya Kabupaten Sukabumi. Selama ini memang ada yang memanfaatkan harga gabah dan beras khususnya saat memasuki musim panen raya, bahkan informasinya tengkulak hanya memberi GKG dengan harga Rp.3.700 padahal sesuai HPP harga

GKG ini Rp. 4.600 kemudian harga gabah kering panen Rp. 3.750 dan beras Rp. 3.750.

“Dengan diserapnya secara langsung gabah dan beras dari petani maka harga pangan ini akan stabil di tingkat pasar dan semangat petani untuk bercocok tanam akan kembali meningkat. Kementan juga merasa miris dengan adanya informasi bahwa harga GKG hanya Rp3.700 yang diserap oleh tengkulak. Kami terus berupaya memutus mata rantai distribusi, jika program ini berjalan baik maka harga beras di pasar dipastikan akan selalu stabil, Maka dari itu, dengan adanya Program Serap Gabah ini yang diuntungkan oleh petani, sehingga dengan putusnya mata rantai distribusi baik gabah maupun beras ini seluruh keuntungan masuk ke petani” ujar Mentan.

Menurut Mentan, Tim Sergab akan menerjunkan ratusan ribu orang terdiri dari Tenaga Harian Lepas (THL) penyuluh di Propinsi Jawa Barat, petani/gapoktan, unsur TNI yang nantinya akan bekerjasama dengan Bulog, Tim gabungan melibatkan Kementerian Pertanian, Bulog, kelompok tani, pemerintah daerah, didampingi TNI dan Polri untuk segera bergerak membeli gabah langsung dari petani. Dengan begitu, dapat memutus rantai perniagaan padi menjadi beras yang selama ini selalu menguntungkan pihak ketiga (tengkulak).

“Langkah ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas kekecewaan Presiden Joko Widodo terkait rendahnya penyerapan gabah petani dan rendahnya harga gabah petani. Semua tim gabungan bekerja serentak dan simultan. Tidak hanya di Sukabumi tetapi juga di beberapa provinsi lain di 17 provinsi lumbung beras lainnya di antaranya Jawa Tengah dan Jawa Timur, Kalau seluruh Indonesia akan diturunkan sebanyak 300 ribu personel Tim Sergab dengan target 1 hingga 2 minggu ke depan harga beras secara nasional stabil,” kata Mentan.

Lebih lanjut Mentan mengintruksikan Bulog agar dapat membeli gabah kering panen di tingkat petani di Sukabumi sesuai HPP yaitu Rp. 3.700 per kilogram. Saat sekarang, harga GKP di tingkat petani Rp 3.000/kg. Rendahnya tingkat serapan gabah salah satunya disebabkan produktivitas tahun lalu yang hingga Maret 2016, yang menurut BPS mencapai 75 ton atau setara kenaikan suplai beras hingga 100 persen di sejumlah pasar. Jika harga GKP Rp. 3.000 per kilogram itu sangat ironis sekali.

“Saya intruksikan kepada Bulog untuk membeli GKP di Sukabumi sesuai dengan HPP, Harga gabah di Sukabumi misalnya di bawah harga pembelian pemerintah (HPP) hanya Rp 3.300 per kilogram. Padahal, HPP gabah kering

panen (GKP) mencapai Rp 3.700 per kilogram ditingkat petani. Anjloknya harga gabah dikarenakan berbagai faktor. Salah satunya sesuai dengan prediksi Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan ada kenaikan produksi pada 2015” ujar Mentan.

Dalam kesempatan yang sama Ketua KTNA Kabupaten Sukabumi Sofyan menyebutkan berdasarkan data Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Sukabumi kondisi saat sekarang, petani masih memilih menjual langsung padi/gabah langsung ketengkulak meski harga jual lebih tinggi dari harga yang ditetapkan pemerintah namun petani mesti mengeluarkan biaya angkut, giling dan transportasi. Jika harga jual gabah kering giling langsung ketengkulak sebesar Rp. 4.800.

“Harga itu memang lebih tinggi dari yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 4.600 namun nilai keuntungan lebih kecil bila langsung menjual ke tengkulak. Belum biaya angkut atau transportasi, belum biaya giling total bersih paling kita hanya terima Rp. 4.400. Kalau pemerintah langsung yang turun dan memutus mata rantai itu langsung membeli ke petani tentunya akan memangkas biaya yang harus dikeluarkan petani dengan harga cukup tinggi,” tutur Ketua KTNA Kabupaten Sukabumi..





Kementan Lakukan MoU Untuk Kendalikan Harga Gabah

"Fakta empirik penambahan pasokan padi dimana biasanya pada masa paceklik pasokan beras menurun, tapi ternyata pasokan beras justru meningkat. Selain itu, harga padi saat paceklik yang biasa naik 20-30 persen, tetapi kini turun sebesar 20-30 persen. Untuk menjamin terkendalinya harga gabah sekaligus terpenuhinya cadangan beras Nasional perlu dilakukan MoU berupa komitmen bersama"



Usai melakukan panen raya, Mentan Amran Sulaiman menyaksikan penandatanganan MoU Nota Kesepakatan Bersama dalam rangka penyerapan gabah petani, Kepala Subdivre Bulog, Kepala Dinas Pertanian dan Komandan Komando Distrik Militer di Kedungpring, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.

Tim Peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai propinsi Jawa Timur, Dirjen PSP Kementan, Dekopinwil Jawa Timur, Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan, Kapuskopad Kartika Bhirawa Anoraga Kodam V Brawijaya, dan Kepala Koperasi Polda Jawa Timur.

Mentan menjelaskan kondisi harga gabah kering pada panen raya saat sekarang rata-rata Rp.3.000 sampai dengan Rp.3.400 masih jauh di bawah HPP, demikian juga untuk komoditas jagung harga Rp 3.500, sementara Bulog belum melakukan pengadaan yang memadai untuk menjamin terkendalinya harga gabah sekaligus terpenuhinya cadangan beras Nasional, untuk itu dilakukan MOU berupa komitmen bersama diantara Kepala Subdivre Bulog, Kepala Dinas Pertanian, dan Komandan Komando Distrik Militer, di Kedungpring, Lamongan.

Pelaksanaan komitmen tersebut diharapkan Perum Bulog dapat sepenuhnya menyerap Gabah dan Jagung petani yang berasal dari Kabupaten atau daerah yang melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama, untuk mengkondisikan harga sebagaimana yang telah ditetapkan pemerintah secara berkelanjutan dan melaporkan hasil penyerapan setiap minggunya. Presiden sebagai Ketua Dewan Ketahanan Pangan, menginstruksikan untuk melakukan Serap Gabah Petani. Tidak ada waktu diskusi kadar air, mulai hari ini sampai 3 bulan kedepan jangan diskusi kadar air," jelas Mentan.

Walaupun Target Serap Gabah Petani besarnya 10%, tapi Mentan meminta untuk kabupaten Lamongan dapat menyerap gabah sebesar 20%. Kabupaten Banyuwangi, kabupaten Probolinggo ditargetkan Kadvire

Masyarakat Indonesia diharapkan tidak perlu ada lagi keraguan terhadap produksi beras dalam negeri. Sebab, Kementerian Pertanian telah mampu meningkatkan produksi beras, hal itu terbukti dari adanya peningkatan pasokan beras ke 26 pasar di seluruh Indonesia, termasuk Pasar Induk Cipinang sebesar 100 persen. Khusus di Cipinang terdapat lonjakan pasokan hingga 138 persen, dalam Januari-Februari 2016 di mana masa itu saat sekarang adalah masa paceklik dan biasanya pada masa paceklik pasokan menurun.

"Di musim sulit saat ini ternyata pasokan beras justru meningkat. Dengan demikian, angka sementara Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan prakiraan produksi padi Indonesia sebesar 75,3 juta ton, telah didukung dengan fakta empirik penambahan pasokan tersebut. Selain itu, harga padi saat paceklik yang biasa naik 20-30 persen, tetapi kini turun sebesar 20-30 persen" kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat usai melakukan panen raya gabah di Desa Warungring, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, (13/3).

Dalam panen yang dilakukan bersama dengan Pangdam V/Brawijaya dan Bupati Lamongan serta diikuti ribuan petani dengan menggunakan traktor transplan, Mentan menyampaikan pesan agar swasembada pangan yang telah diprogramkan pemerintah dapat berhasil. Oleh karena itu, sarana dan prasarana terus diupayakan termasuk menyampaikan ke dinas PU. Tahun 2016 Kabupaten Lamongan mendapatkan bantuan untuk pintu air, agar tidak terjadi banjir lagi.

Kegiatan panen raya di Kabupaten Lamongan juga dilakukan penandatanganan kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) penyerapan gabah antara Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, Dandim Jajaran Kodam V/Brawijaya dan Sub Divreg Jatim yang disaksikan Mentan RI dan Pangdam V/Brawijaya. Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama dalam rangka penyerapan gabah petani antara Kepala Subdivre Bulog, Kepala Dinas Pertanian Propinsi Jatim, dan Komandan Komando Distrik Militer, di Kedungpring, Lamongan.

Mentan, bersama Wakil Ketua Komisi IV, Pangdam V Brawijaya, Bupati Lamongan, dan Wakil Bupati Lamongan hadir menyaksikan penandatanganan MOU tersebut. Hadir pula Ketua Upsus



menyerap 65 ribu ton setara beras. Divre Madura 25 ribu, Bondowoso 55 ribu, Ponorogo 65 ribu, Malang 71 ribu, Surabaya Utara 95 ribu, Surabaya Selatan 85 ribu, Kediri 55 ribu, Madiun 50 ribu, Tulungagung 50 ribu, dan Jombang 70 ribu.

"Sigapnya pemerintah dalam melindungi petani "Serap Gabah ini dilakukan mulai tanggal 10 Maret 2016 untuk pertemuan, lalu dilanjutkan dengan membuat SK pada 11 Maret 2016 dan pada 12 Maret 2016 dilakukan pencaangan di daerah Jawa Barat, dan hari ini Bulog diharapkan telah siap untuk menyerap gabah petani, dan ini akan terus dilakukan lanjutannya," ungkap Mentan.

Kemudian Mentan menawarkan kepada Tenaga Harian Lepas (THL) di Lamongan sebagai indikator penyerapan sebanyak 5.000 ton setara beras per orangnya, dan dapat diangkat status kepegawaianya jika sampai 4 bulan kedepan dapat memenuhi target. Sebagaimana di Jawa Barat, 15 THL berjanji menyerap gabah sebanyak 3.000 ton, di Jatim 30 orang THL

menandatangani kemampuan serap gabah sebesar 5.000 ton per orang, dan ini tentu akan menyemangatkan petani.

Dalam kesempatan yang sama Pangdam V/Brw, Sumardi menyampaikan apresiasi kepada petani, PPL, Gapoktan dan Babinsa yang saat ini telah saling berkerjasama mensukseskan program swasembada pangan nasional.

"Kita harus bekerja dan bekerja demi mendukung program pemerintah yaitu swasembada pangan. Saya yakin apabila Bulog mau menyerap padi dari para petani dengan program yang telah di canangkan pemerintah yaitu Swasembada pangan akan sesuai target," ujar Pangdam V/Brw.

Demikian juga Bupati Lamongan H Fadeli yang turut menyampaikan apresiasi terhadap peranan Babinsa TNI dalam mengawal program swasembada pangan. Bupati juga mengharapkan dengan adanya program Sergap yang dicanangkan oleh Kementan peran Bulog bisa membeli gabah dari petani yaitu seharga 3700 per/kg, agar petani khususnya di Kabupaten Lamongan bisa

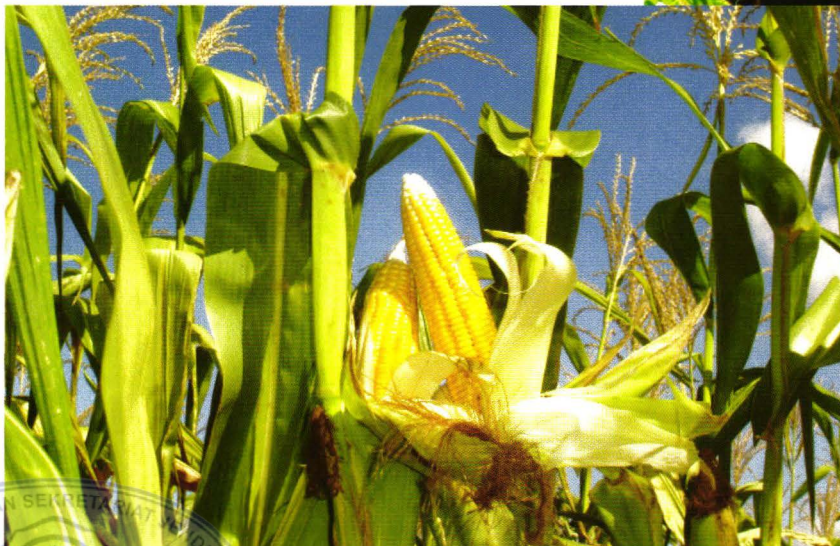
sejahtera.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPR RI Viva Yoga M, yang turut hadir dalam kegiatan itu berharap agar Bulog bisa menerima gabah petani berapapun kadar airnya. Apabila Bulog tidak mau menerima padi dari petani segera laporkan ke DPR RI.

Selain melaksanakan panen raya, Mentan dan Pangdam V/Brawijaya juga melakukan peninjauan ke proses penggilingan padi menjadi beras di UD Tani Makmur Kedungpring dan mengunjungi peternakan sapi yang dikelola Taman Tehnologi Pertanian (TTP) Desa Banyubang. Usai mengunjungi peternakan sapi, rombongan Mentan dan Pangdam melanjutkan perjalanan menuju Desa Banyubang, Kecamatan Selokuro untuk menghadiri panen raya jagung serta menyerahkan bantuan benih jagung dan pupuk kepada kelompok tani. Selama di Kecamatan Selokuro, Mentan juga mengunjungi pameran produk pertanian Taman Tehnologi Pertanian (TTP) Desa Banyuwangi.

Kembangkan Jagung Di Bone Bolango Kementan Alokasikan Anggaran

"Para petani di daerah Bone Bolango agar terus mengembangkan tanaman jagung sebagai komoditi unggulan, karena pasar cukup potensial. Bahkan untuk menunjang hasil tanaman jagung, Kementan telah mengalokasi anggaran Rp. 9,6 miliar untuk pengembangan produksi jagung termasuk padi dan kedelai di daerah"



Berdasarkan angka sementara yang baru saja dirilis oleh BPS, Kementerian Pertanian menyatakan produksi padi tahun 2015 untuk seluruh Indonesia adalah tertinggi selama 10 tahun terakhir yaitu 75,36 juta ton. Begitu pula dengan jagung yang juga terjadi peningkatan ekspor jagung ke beberapa negara, bahkan tahun 2015 ada kenaikan dibanding tahun sebelumnya.

"Ekspor jagung kita tahun 2015 naik 1.800 persen dimana tahun 2014 kita hanya 37.000 ton, namun di tahun 2015 itu mencapai 252.000 ton, dan penyumbang terbesar salah satunya Provinsi

Gorontalo dengan ekspor jagung dari Gorontalo kurang lebih 109 ribu ton,” kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat berkunjung ke Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo,(16/3).

Mentan berharap para petani di daerah Bone Bolango, untuk terus mengembangkan tanaman jagung sebagai komoditi unggulan, karena pasar cukup potensial. Bahkan untuk menunjang hasil tanaman jagung, Kementan telah mengalokasi anggaran Rp. 9,6 miliar untuk pengembangan produksi jagung termasuk padi dan kedelai di daerah itu. Pemerintah pusat melalui Kementan akan terus memberikan perhatian penuh kepada para petani padi, termasuk para petani di Kabupaten Bone Bolango. Sejak tahun 2015 bahkan tahun 2016 seluruh areal persawahan petani padi di Bone Bolango diberikan bantuan benih secara gratis.

“Bantuan yang diberikan Kementan tidak hanya benih tapi juga Alsintan, seperti hand traktor dan Alsintan lainnya. Tahun ini untuk Bone Bolango kita tambah lagi bantuan hand traktornya sebanyak 25 unit. Untuk keluhan atau permintaan pupuk dari Wabup, itu belum bisa diakomodir, karena sesuai rekomendasi dari BPKP itu bahwa program bantuan pupuk tahun sebelumnya sedikit mengalami masalah. Ada beberapa daerah di Indonesia yang mengalami masalah karena memalsukan bantuan pupuk untuk para petani, makanya tahun ini tidak ada bantuan pupuk. Jadi yang ada hanya subsidi,” jelas Mentan.

Lebih lanjut Mentan menerangkan adanya program untuk mengasuransikan para petani yang mengalami gagal panen. Berapapun bantuan yang diminta pemerintah daerah akan disalurkan pemerintah pusat, khususnya untuk meningkatkan swasembada pangan nasional.

“Petani akan diasuransikan, sehingga bila gagal panen akan ada pengembalian kerugian bagi mereka, berapapun yang diajukan, pasti akan disetujui. Maka pemerintah daerah harus minta sebanyak-banyaknya, khususnya alat dan mesin pertanian,” terang Mentan.

Terkait kopi, Mentan mengungkapkan bahwa bantuan dana sebesar Rp. 400.000.000 dari Kementerian Pertanian yang ditujukan untuk program peremajaan tanaman Kopi di Kecamatan Pinogu Kabupaten Bone Bolango. Anggaran itu akan dicairkan melalui Kredit Usaha Rakyat. Bunganya tidak akan membebani petani hanya 9 persen per tahun.

“Insya Allah tahun 2016 ini kita akan bantu replanting peremajaan tanaman kopi untuk 100 hektar Kopi Pinogi di Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango, anggarannya kita akan bantu sebesar Rp. 400 juta lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada perbankan yakni Bank Rakyat Indonesia BRI,” ungkap Mentan

Potensi pengembangan Kopi Pinogu 1.356,67 hektar dengan produksi 23,06 ton dan provitas 115/Kg/hektar. Selain

Kopi Pinogu yang perlu mendapatkan perhatian juga adalah produksi aren yang merupakan komoditas unggulan daerah dengan potensi pengembangan 509 hektar, produksi 583,83 ton, dan provitas 1.456 Kg/hektar.

Menanggapi bantuan dana dari Kementan, Wakil Bupati Bone Bolango, Kilat Wartabone memberi apresiasi ke Kementerian Pertanian yang akan memberikan bantuan dana melalui alokasi anggaran Rp. 9,6 miliar untuk pengembangan produksi Padi, Jagung dan Kedelai (Pajale) di daerah itu.

“Kami sangat mengapresiasi bantuan Kementan untuk pengembangan sektor pertanian di daerah, alokasi anggaran ini akan dimanfaatkan sebaik mungkin. Kabupaten Bone Bolango mempunyai luas sawah irigasi 2.102 hektare dan tadah hujan 219 hektare” kata Wabup Bone Bolango

Sementara terkait kondisi saat sekarang yang sedang panen, Wabup Bone Bolango menerangkan di lokasi panen yang sedang dikunjungi oleh Mentan, produksi panen mencapai 7-8 ton/hektare dengan menggunakan varietas Ciheran, Mekonggadan Inpari 30. Sedangkan permasalahan yang masih dihadapi dalam usaha tani padi adalah kurangnya alat mesin pertanian (Alsintan) dan mungkin bantuan pupuk dalam mendukung produksi padi dan produktivitas padi.



Mentan Andi Amran Sulaiman saat melakukan panen raya jagung di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo.

Untuk Serap Gabah Di Sulsel Kementan Kerahkan Penyuluh

“Penyerapan gabah dan beras di Sulawesi Selatan untuk mensejahterakan petani, Kementan menargetkan satu juta ton gabah terserap di Sulsel, dengan melibatkan penyuluh pertanian PNS, tenaga harian lepas dan tenaga bantu penyuluh pertanian, kelompok tani yang tergabung pada gabungan kelompok tani (Gapoktan), kelembagaan ekonomi petani dan Badan Urusan Logistik divisi regional setempat”



Usai memberikan sambutannya Mentan bertatakeramah bersama para petani dan Babinsa di Kabupaten Takalar Sulsel.

Sulawesi Selatan dikenal sebagai salah satu lumbung beras nasional. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian menaruh perhatian khusus untuk Sulsel. Kementan menargetkan penyerapan gabah dari Provinsi Sulawesi Selatan mencapai satu juta ton untuk periode Maret-Mei 2016. Untuk menggenjot target tersebut, Kementan mengerahkan 1700 penyuluh pertanian lapangan (PPL) di seluruh Sulsel.

“Target kita sergab (serap gabah) Sulsel satu juta ton, kita akan kerahkan seluruh PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) yang ada di Sulsel, dikawal oleh Bulog yang menyiapkan dana, kita mulai hari ini,” kata Menteri Pertanian, Amran Sulaiman saat menghadiri acara Serap Gabah (Sergab) Harga Stabil di Kabupaten Takalar, Sulsel, Selasa (15/3).

Mentan menargetkan satu juta ton gabah terserap di Sulsel, dengan melibatkan 1.724 orang penyuluh pertanian PNS, 718 orang tenaga harian lepas dan tenaga bantu penyuluh pertanian (THL-TB PP), 37.173 kelompok tani yang tergabung pada gabungan kelompok tani (Gapoktan), 709 orang dari kelembagaan ekonomi petani (KEP) dan Badan Urusan Logistik (Bulog) divisi regional setempat.

“Saya harapkan seorang penyuluh pertanian lapangan atau PPL dapat menyerap minimal seribu ton gabah dikawal oleh Bulog divisi regional, Bulog, akan menyiapkan dana hingga Rp 20 triliun untuk menyerap gabah petani secara nasional, sedangkan penyerapan gabah di Sulsel diperkirakan membutuhkan anggaran hingga Rp. 6 triliun” ujar Mentan.

Lebih lanjut Mentan menjelaskan bahwa penyerapan gabah dan beras di Sulawesi Selatan untuk mensejahterakan petani, kepada para THL, Mentan menginstruksikan agar dapat melakukan serapan dari masing-masing THL menyerap 1.000 sampai 3.000 ton gabah dari petani. 7 dari THL telah menyanggupi untuk menyerap gabah sebanyak 5.000 ton.

“Sedangkan dengan adanya penandatanganan kesepakatan kerjasama antara Kementerian Pertanian dengan Kepala Sub Divre Bulog di setiap kabupaten, maka program yang dilaksanakan diharapkan dapat memberikan jaminan untuk menerima harga yang pantas dan menguntungkan petani” jelas Mentan.

Terkait dengan kendala penyerapan gabah oleh Bulog karena rendahnya HPP, Kementan akan mendiskusikan hal itu

dengan Bulog. HPP Bulog saat sekarang Rp. 3.700 per kg, sedangkan harga pembelian oleh pedagang di tingkat petani di kisaran Rp. 4.300 hingga Rp. 4.500.

“Nanti didiskusikan kembali dengan Bulog, yang penting target tersebut tercapai, Target ini harus dicapai jika mencintai jabatannya. Secara khusus, Kementan memberikan target tertulis kepada masing-masing Kepala Sub Divre Bulog di 10 kabupaten di Sulsel” kata Mentan.

Mengawali kegiatan Serap Gabah di Provinsi Sulawesi Selatan, Mentan melakukan panen padi di Desa Pa’rasangang Beru, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar bersama Gubernur Sulawesi Selatan dan Panglima Kodam VII Wirabuana. Pada acara tersebut dilakukan juga pemberian bantuan alsintan sebanyak 51 unit traktor tangan roda 2 oleh Mentan kepada petani dan Babinsa.

“Dengan sistem mekanisasi dalam pertanian, diharapkan target-target pertanian dapat dicapai. “Dengan menggunakan teknologi, pengolahan lahan yang biasanya tiga bulan dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu dengan menggunakan teknologi modern, diharapkan tingkat kehilangan semakin bisa ditekan, serta dapat meningkatkan produktivitas para petani” kata Mentan.

Kementan siap untuk menurunkan bantuan bagi para petani. Untuk target keseluruhan dari program Serap Gabah tersebut mencapai 4-5 juta ton dalam kurun waktu 2-3 bulan. Sulsel merupakan provinsi ke empat yang dikunjungi untuk memimpin langsung Serap Gabah setelah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Di samping itu, Kementan juga memberikan bantuan benih padi Inpari 10 kelas FS dan SS, Inpari 31, Inpari 33 masing-masing sebanyak 50 kg. Inpagoda 4



label BS, Inpago 10 dan Inpari 24 masing-masing sebanyak 20 kg. Inpari 30 dan Inpari 32 masing-masing sebanyak 100 kg.

Bantuan benih kedelai juga diberikan oleh Mentan pada varietas Anjasmoro dan Argomulyo masing-masing kelas SS 1 ton, dan benih jagung hibrida Bima 19 URI 1 dan Bima 20 URI masing-masing sebanyak 1 ton.

Dalam kesempatan yang sama Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengatakan luas areal sawah yang siap panen di

Sulsel mencapai 550.000 hektar dan realisasi panen hingga Maret sekitar 250.000 hektar, sehingga ada sekitar 300.000 hektar yang akan memasuki masa panen, dan diperkirakan dapat mencapai target satu juta ton gabah.

“Hingga Juni mendatang, masih terdapat lahan seluas 300 ribu ha yang belum dipanen, dengan estimasi produksi hingga 858 ribu ton beras. Dengan perkiraan harga beras Rp7.000 per kg, maka uang yang berputar diharapkan mencapai Rp. 6,26 triliun. Secara keseluruhan, dari padi, uang yang

berputar mencapai Rp34 triliun,” kata Gubernur Sulsel.

Sedangkan Bupati Takalar, Burhanuddin mengaku bangga karena Mentan sudah dua kali berkunjung ke Kabupaten Takalar, setelah sebelumnya melakukan panen kacang tanah pada 27 Oktober 2015.

“Warga Takalar mengaku bangga karena Mentan sudah dua kali melakukan panen di sini, kali ini Takalar mampu mendukung penyerapan gabah dan swasembada pangan,” kata Bupati Takalar.

Atasi Gejolak Harga Unggas Kementan Lakukan Pertemuan Dengan Para Peternak



Usai penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama Mentan Andi Amran Sulaiman bersalam-salaman dengan para pengusaha unggas di Kampus Kementan.

“Kementan melakukan pertemuan bersama dengan semua peternak, baik skala kecil, menengah maupun besar, dan juga dengan seluruh asosiasi yang berhubungan dengan unggas. Tujuannya untuk mengatasi gejolak harga di sektor perunggasan, kehadiran pemerintah dalam hal ini adalah sebagai pemberi jalan dan pengakomodasi setiap kepentingan masyarakat, sehingga tercipta keadilan dan tidak ada yang merasa dirugikan”

Gejolak harga di sektor perunggasan membuat Pemerintah Indonesia terus mengupayakan sejumlah langkah konkrit guna meretasnya. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian mencetus enam poin kerja sama dengan para peternak unggas. Upaya kerjasama antara Pemerintah dan pelaku usaha tersebut menjadi penting untuk mengawali terciptanya keseimbangan harga serta ketersediaan stok di sektor perunggasan tanah air, terutama di tingkat pasar.

“Tujuan dikeluarkannya hasil kesepakatan dan kerjasama antara pemerintah dan peternak ini yakni, agar para pelaku usaha dan peternak kecil bisa mendapat keuntungan yang wajar. Pengusaha dapat untung, konsumen pun tersenyum dengan harga yang wajar,” kata Menteri Pertanian, Amran Sulaiman saat usai penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama pengusaha unggas di Ruang Pola, Gedung A, Kantor Pusat Kementan (21/3).

Dalam acara yang dihadiri dari Perusahaan Peternakan Ayam seperti PT. Charoen Pokphan Indonesia, Tbk., PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk, PT. Malindo Feedmill Indonesia Tbk, PT.

CJ-PIA, PT. LTB, PT. Cibadak Indah Sari Farm, PT. Wonokoyo Jaya Corp, CV Missouri, PT. Hybro Indonesia, PT. Patriot Intan Abadi, PT. Sierad Produce Group, Sinta Feed Group, PT. Sido Agung Group, dan Mustika Group. Sedangkan dari Peternak Ayam seperti Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional, Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia, Perhimpunan Peternak Unggas Nusantara, Perhimpunan Peternak Unggas Indonesia, Front Peternak Indonesia, Mentan menegaskan perlunya dukungan semua pihak mengenai iklim usaha yang kondusif dengan sinergitas dan peran serta para pelaku usaha melalui penyusunan regulasi bidang perunggasan Nasional.

Mentan menerangkan gagasan Nota Kesepahaman Bersama tersebut diawali pertemuan pada tanggal 18 Maret 2016 untuk mengatur usaha perunggasan, dan didasari keinginan bersama agar dapat melaksanakan tugas pembangunan pertanian di bidang peternakan dan kesehatan hewan sub sektor perunggasan, Kementan bersama dengan Perusahaan Peternakan Ayam, dan Asosiasi Peternakan Ayam melakukan pertemuan lanjutan untuk menginisiasi Nota Kesepahaman Bersama Kementan dengan Pengusaha Unggas. Pada tanggal 21 Maret 2016 Kementan melakukan langkah kerja sama dengan sejumlah pelaku usaha di sektor peternakan unggas (kecil, menengah, dan besar). Langkah kerja sama itu merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan harga dan stok di sektor perunggasan.

"Kita melakukan pertemuan bersama dengan semua peternak, baik skala kecil, menengah maupun besar, dan juga dengan seluruh asosiasi yang berhubungan dengan unggas. Tujuannya untuk mengatasi gejolak harga di sektor perunggasan, kehadiran pemerintah dalam hal ini adalah sebagai pemberi jalan dan pengakomodasi setiap kepentingan masyarakat, sehingga tercipta keadilan dan tidak ada yang merasa dirugikan. Kita fasilitasi agar semuanya bisa menjaga keseimbangan dan semua kepentingan bisa terakomodasi dengan baik saya memastikan bahwa dari hasil pertemuan tersebut ada sejumlah hasil kesepakatan yang menjadi pedoman bersama" terang Mentan.

Lebih lanjut Mentan memaparkan hasil pertemuan tersebut ada sejumlah hasil kesepakatan yang menjadi pedoman bersama. Ruang lingkup hasil nota kesepahaman Kementan dan pelaku perunggasan tersebut diantaranya: 1. Pengembalian suplai-demand daging ayam; 2. Keadilan dalam berusaha pada budidaya ayam; 3. Pelaku integrasi vertikal wajib menyelesaikan integrasinya sampai dengan hilirisasinya, dan peternak besar dengan skala tertentu wajib membuat rumah potong hewan; 4. Pengembangan sektor hilir dan ekspor bagi pelaku integrasi vertikal; 5. Konsolidasi nasional usaha dan industri perunggasan melalui perbaikan di berbagai aspek hulu-hilir; 6. Moratorium pembangunan kandang "Close House" bagi perusahaan besar dan afiliasinya yang melakukan pola kemitraan dan budidaya internal farm, sampai dengan adanya rumah potong ayam dan blast freezer hingga adanya penampungan.

"Ada enam poin yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut. Enam butir



kesepakatan itu antara lain mengembalikan keseimbangan supply-demand daging ayam, keadilan dalam berusaha di budi daya ayam, kewajiban menyelesaikan integrasi sampai hilir, pengembangan sektor hilir, dan ekspor bagi pelaku integrasi vertikal. Enam butir kesepakatan itu, akan ditindaklanjuti dengan pembentukan tim pengkaji teknis. Kajian akan dijadikan dasar untuk menerbitkan peraturan Menteri Pertanian. Meski begitu, dari enam poin hasil kesepakatan antara kementan dan para peternak, tidak akan berjalan maksimal sebelumnya dikeluarkan Peraturan Kementerian Pertanian (Permentan) yang memayungi hasil kesepakatan tersebut. Permentan akan kami keluarkan secepatnya sehingga hasil kesepakatan ini bisa berjalan sepenuhnya dan menjadi panduan bersama bagi semua peternak, baik kecil, menengah, dan besar," papar Mentan.

Terkait kebijakan afkir dini unggas yang digulirkan Kementan pada akhir 2015 lalu yang dinilai sebagai praktik kartel oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan dibawa ke jalur hukum, Mentan menjelaskan bahwa untuk sementara proses afkir dini unggas pun dihentikan hingga hari ini. Dari target pemusnahan ayam sebanyak 6 juta ekor, pemerintah dan peternak baru merealisasikan afkir dini unggas sebanyak 3 juta ekor.

"Praktik afkir dini unggas sebanyak 3 juta ekor bibit ayam akan dilakukan setelah Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Pengendalian Produksi Unggas rampung disusun. Namun, Kementerian Pertanian (Kementan) belum memastikan kapan Permentan tersebut akan diberlakukan. Keberadaan Permentan tersebut juga nantinya akan menjadi dasar hukum instruksi Kementan agar praktik afkir dini tidak disebut kartel oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)" jelas Mentan.

Mentan mengungkapkan Pemerintah akan menginstruksikan moratorium pembangunan kandang close house bagi

perusahaan besar dan aviliasinya yang melakukan pola kemitraan. Namun, tenggang waktu moratorium akan dibahas lebih lanjut. Selain itu, konsolidasi usaha dan industri unggas melalui perbaikan di berbagai aspek dan moratorium pembangunan kandang close house bagi perusahaan besar dan afiliasinya.

"Moratorium berlaku sampai ada rumah potong ayam dan blast freezer. Khusus pelaku pengusaha unggas integrasi vertikal wajib menyelesaikan integrasinya sampai hilirisasi. Di mana, peternak besar dengan skala tertentu wajib membangun rumah potong unggas. Akan dilakukan pula agenda pengembangan sektor hilir dan ekspor bagi pelaku integrasi vertikal" ungkap Mentan.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Muladno mengatakan, bentuk kesepakatan tersebut adalah menjaga pasokan daging ayam di pasaran agar harga di masyarakat tidak sampai terjadi lonjakan harga atau pun penurunan drastis hingga merugikan pedagang. Salah satu solusi yang akan dipertimbangkan seperti afkir dini atau pemusnahan induk ayam (Parent Stock), untuk menjaga jumlah ayam yang beredar tidak terlalu banyak sehingga harganya jatuh. Tetapi afkir akan dilakukan kalau sudah ada dasar hukum yang tetap. Selain itu, akan dilakukan pula pembenahan tata niaga dan tata produksi daging ayam.

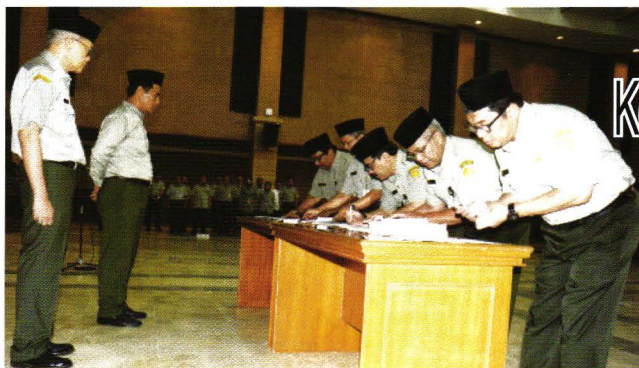
"Agar produsen besar ayam dapat membangun fasilitas terintegrasi industri unggas dari mulai peternakan, pemotongan hingga penyimpanan Tujuannya adalah memotong rantai dari peternak hingga pedagang yang selama ini dianggap sebagai salah satu biang keladi tingginya harga ayam di pasar, namun anjlok di tingkat peternak. Kondisi peternak rakyat saat ini memang terpantau semakin memprihatinkan.



Meski harga daging ayam di pasaran saat ini berkisar Rp 30.000-Rp 35.000, harga ayam hidup di tingkat peternak hanya Rp. 13.000-Rp14.000 per ekor. Tingkat permintaan dan penawaran nantinya ditetapkan sendiri oleh para pelaku usaha. Dengan kesepakatan ini, KPPU memperbolehkan praktek pengapkiran dini” kata Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Ketua Umum Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas, Krissantono, berharap dengan adanya kesepakatan ini tidak lagi tudingan dari KPPU tentang praktek kartel di sektor perunggasan. Sebab, pengembalian keseimbangan supply-demand bisa ditafsirkan untuk melanjutkan pengapkiran dini. Sebelumnya, KPPU menduga ada kartel atau pengaturan persediaan ayam

di pasar oleh 12 perusahaan peternakan. Mereka diduga sengaja melakukan pemusnahan atau pengapkiran indukan ayam. Tujuannya, persediaan ayam anakan berkurang, sehingga harganya naik. Hal itu dinilai melanggar undang-undang anti monopoli.



Mentan Andi Amran Sulaiman di dampingi Sekretaris Jenderal Hari Priyono saat melantik 5 (lima) orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Pertanian di Kampus Kementan

Untuk Capai Swasembada Pangan Kementan Butuh Kerja Pejabat Di Atas Rata-Rata

“Kementan tidak mungkin mencapai sasaran dengan pejabat yang cara bekerjanya biasa-biasa saja dalam menggerakkan sumberdaya untuk mencapai target swasembada pangan yang telah Pemerintah canangkan. Untuk itu para pejabat yang baru dilantik sekalian segera berkonsolidasi dengan jajaran instansi terkait dan menggerakkan sumberdaya di Unit Kerja yang dipimpinnya”



Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 174/Kpts/KP.30/3/2016 tanggal 10 Maret 2016, Menteri Pertanian menetapkan dan melantik 5 (lima) orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Pertanian yaitu Direktur Perbibitan dan Produksi Temak, Kepala Pusat Pelatihan Pertanian, Kepala Pusat Pendidikan Pertanian, Kepala Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian, dan Ketua Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Magelang. Kelima pejabat tersebut adalah pegawai yang telah ditetapkan dari hasil mutasi Jabatan Tinggi Pratama Kementerian Pertanian

Tahun 2016.

“Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ini kita lakukan sebagai upaya peningkatan kinerja organisasi. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa organisasi kita harus selalu dinamis dalam rangka melaksanakan tugas-tugas besar percepatan pencapaian swasembada pangan. Tugas-tugas tersebut membutuhkan pejabat yang pekerja keras, memiliki komitmen tinggi, dan mempunyai leadership yang tangguh dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di setiap unit kerja” kata Menteri Pertanian, Amran Sulaiman saat memberikan sambutan pada acara pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Kampus Kementerian Pertanian (21/3).

Kepada pejabat yang baru dilantik, Mentan mengingatkan bahwa Kementan tidak mungkin mencapai sasaran dengan pejabat yang cara bekerjanya biasa-biasa saja dalam menggerakkan sumberdaya untuk mencapai target swasembada pangan yang telah Pemerintah canangkan. Untuk itu Mentan berharap pejabat yang baru dilantik sekalian segera berkonsolidasi dengan jajaran instansi terkait dan menggerakkan sumberdaya di Unit Kerja yang dipimpinnya.

Kepada Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, Mentan meminta agar segera melakukan langkah aksi untuk peningkatan kinerja perbibitan dan produksi temak. Dalam rangka pengadaan sapi indukan, segera rencanakan dan laksanakan dengan baik

proses lelang dan kontrak pengadaan untuk 50.000 ekor. Peningkatan produksi daging harus terus dipacu melalui berbagai upaya diantaranya adalah inseminasi buatan untuk 3 juta akseptor dan kegiatan pendukung lainnya.

Mentan menugaskan Kepala Pusat Pelatihan Pertanian agar segera menetapkan program dan kegiatan strategis peningkatan kapasitas petugas dan petani melalui berbagai pelatihan dalam rangka mendukung upaya percepatan pencapaian swasembada pangan. Sedangkan Kepala Pusat Pendidikan Pertanian, agar segera menetapkan program dan kegiatan pendidikan pertanian untuk peningkatan kapasitas aparatur di jajaran Kementerian Pertanian. Tingkatkan kualitas pendidikan di berbagai Sekolah di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian.

Untuk Kepala Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian, Mentan memerintahkan agar segera tata kembali dan perkuat program penguatan kapasitas manajemen sumberdaya manusia pertanian mendukung percepatan swasembada pangan. Pusat PMKP jangan hanya menjual fasilitas akomodasi dan konsumsi, tetapi mengambil peran dalam mengatasi kelemahan manajemen

pembangunan pertanian. Sedangkan Ketua Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Magelang, Mentan menghimbau untuk segera menetapkan langkah aksi untuk meningkatkan kapasitas para penyuluh melalui upaya perbaikan mutu pendidikan penyuluhan. Persiapkan tenaga-tenaga penyuluh handal melalui sistem pendidikan modern untuk peningkatan pendampingan dan pengawalan program.

Lebih lanjut Mentan memaparkan bahwa selama satu tahun setengah, Kementan telah bekerja keras melaksanakan program Upaya Khusus (UPSUS) Swasembada Pangan dan peningkatan produksi komoditas strategis padi, jagung, kedelai, gula, daging sapi/kerbau, cabai dan bawang merah.

"Alhamdulillah kinerja kita telah mengindikasikan keberhasilannya, ditunjukkan pasokan pangan cukup stabil dengan produksi pangan utamanya beras yang surplus lebih dari 10 juta ton serta hambatan distribusi dan permainan perdagangan dapat kita redam. Semua itu tidak dapat kita lakukan apabila kita bekerja biasa-biasa saja" papar Mentan.

Mentan juga menerangkan dalam sebulan terakhir kunjungannya di beberapa provinsi dan kabupaten/kota sebagai bagian dari agenda panen raya di

7 provinsi, kita meyakini bahwa program UPSUS Swasembada Pangan sangat besar manfaatnya dalam mendorong capaian kinerja produksi pangan. Berdasarkan Angka Sementara (ASEM) BPS 2015, produksi padi tahun 2015 sebanyak 75,36 juta ton GKG, mengalami kenaikan 4,51 juta ton atau 6,37% dibandingkan tahun 2014; produksi jagung sebanyak 19,61 juta ton pipilan kering, meningkat 0,60 juta ton atau 3,17% dibandingkan tahun 2014; dan produksi kedelai sebanyak 963,10 ribu ton biji kering, meningkat 8,10 ribu ton atau 0,85% dibandingkan tahun 2014.

"Kinerja produksi pangan tersebut harus terus kita tingkatkan pada tahun 2016. Upaya untuk meningkatkan produksi melalui upaya peningkatan luas tambah tanam yang telah kita targetkan seluas 9,5 juta ha pada musim tanam Oktober-Maret 2015/2016 harus mampu diwujudkan. Namun demikian tantangan dan kendala pada 2016 masih cukup berat, diantaranya adalah hambatan distribusi komoditi di beberapa daerah, rantai pasok perdagangan pangan yang panjang, harga yang tidak menguntungkan petani, keuntungan pedagang yang bertipat-lipat dan harga di tingkat konsumen yang tinggi. Untuk itu Saya minta kerja keras kita semua" terang Mentan.

Buktikan Stok Beras Nasional Aman Kementan Lakukan Panen Raya Serentak



"Kementan melakukan kegiatan panen raya serentak sebagai gong penanda bahwa Indonesia tengah memasuki masa panen. Sehingga persediaan beras nasional aman. Adanya panen menunjukkan bahwa pemerintah berhasil dalam mengelola sistem dan pola tanam serentak dengan baik di tengah cuaca yang cukup mendukung serta dukungan alat mesin pertanian yang memadai"

Untuk membuktikan bahwa Indonesia memiliki stok beras yang terjamin, Kementerian Pertanian menggelar panen raya serentak yang dipusatkan di Kabupaten Cilacap Jawa Tengah. Panen yang juga dilaksanakan di enam daerah lain yaitu Kabupaten Langkat (Sumatera Utara), Kabupaten Banyuwangi (Sumatera Selatan), Kabupaten Ngawi (Jawa Timur), Kabupaten Tapin (Kalimantan Selatan), Kabupaten Lombok Barat (Nusa Tenggara Barat) dan Kabupaten Wajo (Sulawesi Selatan).



Mentan Andi Aman Sulaiman saat panen raya di Desa Mernek, Cilacap.



"Kegiatan panen raya ini sebagai gong penanda bahwa saat ini Indonesia tengah memasuki masa panen. Sehingga, beberapa bulan ke depan persediaan beras nasional aman. Panen ini menunjukkan bahwa pemerintah berhasil dalam mengelola sistem dan pola tanam serentak dengan baik di tengah cuaca yang cukup mendukung serta dukungan alat mesin pertanian yang memadai," kata Menteri Pertanian, Amran Sulaiman saat acara panen raya di Desa Mernek-Cilacap (29/2).

Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten terluas di Provinsi Jawa Tengah dengan produktivitas gabah rata-rata 5,1 ton per hektar. Pada tahun 2015, kabupaten Cilacap dapat surplus beras hingga mencapai 368 ribu ton. Hal itu menjadi motivasi untuk terus membangkitkan lahan tidur menjadi lahan produksi. Untuk Desa Mernek sendiri memiliki luas tanam seluas 293 hektar dengan produktivitas 6 ton/ha.

Kementerian Pertanian melakukan Kegiatan panen raya serentak di 7 provinsi meliputi 293 hektare di Jawa Tengah, 340 hektare di Jawa Timur, 494 hektare di Nusa Tenggara Barat (NTB), dan 600 hektare di Sumatera Utara, 1.200 hektare di Sumatera Selatan, 100 hektare di Kalimantan Selatan, dan 100 hektare di Sulawesi Selatan.

Mentan memaparkan data BPS menunjukkan adanya peningkatan produksi di tahun 2015 dibandingkan tahun 2014. Prediksi produksi gabah pada periode panen raya Maret mencapai 12,8 juta ton GKG setara dengan 7,9 juta ton beras. Produksi tersebut diperoleh dari luas panen 2,4 juta ha. Produksi cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi beras penduduk sekitar 2,6 juta ton/bulan.

"Gerakan pola tanam cepat telah dimulai, termasuk penggunaan benih unggul sehingga biasanya bulan Januari – Februari mengalami musim paceklik, tetapi justru sekarang stok kita melimpah. Panen raya untuk keseluruhan wilayah di

Indonesia diperkirakan terjadi pada Maret dan April dengan target mencapai 14,52 juta ton" papar Mentan.

Mentan menyatakan walaupun mengalami kemunduran waktu tanam akibat dampak El Nino dan lainnya tetapi produksi padi awal tahun 2016 meningkat. Hal itu karena berbagai program yang telah dilakukan oleh Kementan dalam antisipasi kekeringan secara dini dan masif diantaranya melalui penyaluran pompa air dan Alsintan lainnya, pembangunan rehabilitasi embung, long - storage, rehabilitasi jaringan irigasi, hujan buatan dan lainnya serta gerakan percepatan tanam padi.

"Produksi yang melimpah ini merupakan keberhasilan upaya yang telah digiatkan oleh semua pihak termasuk petani yang memiliki peranan utama dalam rantai pangan. Sehingga dengan adanya Program Tanam, Olah dan Panen Serentak mendorong petani untuk terus meningkatkan produksi yang ada di wilayah masing-masing. Selain itu berlimpahnya produksi dipengaruhi oleh berbagai kebijakan 2015 yang telah terbukti dan terlihat hasilnya di lapangan" kata Mentan.

Lebih lanjut Mentan menerangkan beberapa kebijakan Pemerintah tersebut diantaranya pengadaan dengan pola Penunjukan Langsung, yang berdampak pada penyaluran benih dan pupuk tepat waktu/musim. Kebijakan bantuan benih tidak dilokasi ex-siting berdampak pada luas tambah tanam. Perbaikan irigasi berdampak pada meningkatnya indeks pertanaman. Pengembangan pertanian modern melalui pemberian bantuan alsintan berdampak mempercepat olah tanam, waktu tanam, panen dan pasca panen serta efisiensi biaya dan mengurangi lossis. Kebijakan lainnya seperti Pola tanam jajar legowo dan benih unggul terbukti meningkatkan produktivitas.

"Dari sisi infrastruktur, pihak Kementerian Pertanian telah memperbaiki irigasi yang rusak di berbagai daerah sebanyak 2,6 juta hektar dalam setahun dari target yang ditetapkan

sebelumnya yaitu 3 juta hektar. Didukung dengan penggunaan berbagai teknologi pertanian diantaranya bibit unggul dan mekanisasi pertanian, maka diharapkan kehilangan produksi pangan dapat ditekan semaksimal mungkin. Dengan demikian tahun 2016 kita dapat merasa optimis bahwa produksi padi akan lebih tinggi dibandingkan tahun 2015" terang Mentan.

Memasuki masa panen raya Maret-April menyebabkan pasokan beras di pasar melimpah. Untuk itu Mentan mengharapkan Bulog segera menyerap gabah langsung ke petani. Hal itu dilakukan guna mencegah harga gabah petani tidak anjlok. Pemerintah telah menetapkan HPP Gabah Kering Panen (GKP) Rp 3.700/kg untuk menjamin harga gabah/beras tidak turun pada saat musim panen.

"Dengan adanya peningkatan produksi, kami berupaya untuk memperpendek rantai pasok pangan. Kami meminta BULOG berperan dalam menstabilkan harga. Dengan BULOG membeli gabah dari petani langsung dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), kami berharap disparitas harga di petani dengan harga di konsumen tidak terlalu tinggi" harap Mentan.

Menurut Mentan, kondisi yang terjadi saat sekarang diindikasikan adanya pemasukan beras secara besar-besaran di sentra pasar beras. Hal tersebut mengakibatkan stok beras di pasar melimpah. Harga beras minggu pertama Februari Rp. 13.344 per kg dan di minggu kedua turun menjadi Rp. 7.500 - 10.000 per Kg.

"Sehubungan dengan hal tersebut, dari pihak Kementerian Pertanian telah memperkuat kerjasama dengan menggandeng Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberantas kelompok yang mempermainkan stock beras dan harga ini" ujar Mentan.

Pada panen raya yang dihadiri Kasad TNI, Gubernur Jawa Tengah, Bupati Cilacap, Sekjen KPPU, serta Direktur Operasional dan Pelayanan Publik, Mentan memberikan bantuan alat mesin pertanian berupa traktor roda dua 53 unit, pompa air 20 unit, traktor roda empat 1 unit dan rice transplanter 4 unit.

Dalam kesempatan yang sama, Mentan juga menandatangani nota kesepahaman dengan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) terkait pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dan penguatan Toko Tani Indonesia.

